



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung



20
24

Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kemudahan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel serta sarana pelaporan kinerja dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan pada tahun 2024.

Secara umum laporan kinerja tahun 2024 ini menggambarkan capaian, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja. Kami berharap LKjIP ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang.

Temanggung, 26 Maret 2024

Bupati Temanggung,



Agus Setyawan, S.E.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	2
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	2
2. KONDISI TOPOGRAFI.....	5
3. GEOLOGI.....	7
4. KONDISI DEMOGRAFI.....	7
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	10
1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI.....	10
2. PERANGKAT DAERAH	12
3. SUMBER DAYA APARATUR.....	16
4. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI	18
D. ISU STRATEGIS.....	20
1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI	19
2. PEMULIHAN EKONOMI.....	21
3. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	22
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	24

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	25
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	26
C. TUJUAN DAN SASARAN	27
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	39
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN	42
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	42
H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	43
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI	43
2. PELAKSANAAN.....	45

3. PENGENDALIAN	48
4. PELAPORAN	49
I. PERENCANAAN ANGGARAN.....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024	57
B. CAPAIAN KINERJA	58
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	74
D. AKUNTABILITAS ANGGARAN	178
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.....	185
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	198
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS	199
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	3
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	4
Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	6
Tabel 1.4 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2024	7
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel 1.6 Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung	17
Tabel 1.7 Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 2.2 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung	27
Tabel 2.3 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 2.4 Anggaran Per Program Tahun 2024	49
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	58
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan) Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	59
Tabel 3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	61
Tabel 3.4 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	65
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024.....	67
Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2020 s.d. 2024.....	69
Tabel 3.7 Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	71
Tabel 3.8 Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024.....	73
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	73

Tabel	3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	75
Tabel	3.11	Rata-rata Lama Sekolah di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	75
Tabel	3.12	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja Pada Indikator Rata-rata Lama Sekolah....	76
Tabel	3.13	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Harapan Lama Sekolah.....	78
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	81
Tabel	3.15	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	83
Tabel	3.16	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga.....	84
Tabel	3.17	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	87
Tabel	3.18	Capaian Kinerja Sasaran 3	89
Tabel	3.19	Nilai Persepsi Indeks Toleransi.....	90
Tabel	3.20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3.....	90
Tabel	3.21	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Toleransi	91
Tabel	3.22	Capaian Kinerja Sasaran 4	92
Tabel	3.23	Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran 4.....	93
Tabel	3.24	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Angka Harapan Hidup	94
Tabel	3.25	Capaian Kinerja Sasaran 5	97
Tabel	3.26	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024	100
Tabel	3.27	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Gender	102
Tabel	3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	105
Tabel	3.29	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2023	106
Tabel	3.30	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung.....	107

Tabel	3.31	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Pendapatan per Kapita.....	111
Tabel	3.32	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024.....	114
Tabel	3.33	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	115
Tabel	3.34	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini	116
Tabel	3.35	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Pendapatan per Kapita.....	118
Tabel	3.36	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024	120
Tabel	3.37	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Tahun sebelumnya	121
Tabel	3.38	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024.....	122
Tabel	3.39	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023	123
Tabel	3.40	Faktor pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja Pada Indikator Angka Kemiskinan	125
Tabel	3.41	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya	128
Tabel	3.42	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024	130
Tabel	3.43	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Tingkat Pengangguran terbuka	131
Tabel	3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	133
Tabel	3.45	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks pembangunan Infrastruktur	138
Tabel	3.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	140
Tabel	3.47	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	140

Tabel	3.48	Perbandingan Realisasi IKLH Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Standar Nasional Tahun 2024.....	141
Tabel	3.49	Faktor Pendorong,Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	142
Tabel	3.50	Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	144
Tabel	3.51	Faktor Pendorong,Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks Rasa Aman	145
Tabel	3.52	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	147
Tabel	3.53	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik.....	149
Tabel	3.54	Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024	149
Tabel	3.55	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja IPKD	150
Tabel	3.56	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024	151
Tabel	3.57	Kategori, sebutan dan rekomendasi Indeks Sistem Merit	152
Tabel	3.58	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	153
Tabel	3.59	Persandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur	160
Tabel	3.60	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja	161
Tabel	3.61	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	163
Tabel	3.62	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	164
Tabel	3.63	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani Tahun 2022-2024	165
Tabel	3.64	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Temanggung dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaen dan Kota magelang Tahun 2024.....	166
Tabel	3.65	Rekomendasi dan tindak lanjut LHE SAKIP 2024.....	167

Tabel	3.66	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	171
Tabel	3.67	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.....	171
Tabel	3.68	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	172
Tabel	3.69	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2024.....	172
Tabel	3.70	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	173
Tabel	3.71	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	174
Tabel	3.72	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024.....	174
Tabel	3.73	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	175
Tabel	3.74	Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (unaudited)	179
Tabel	3.75	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024.....	183
Tabel	4.1	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	199
Tabel	4.2	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	201

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Posisi Kabupaten Temanggung Terhadap Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	20
Gambar 2.1 SIPD	43
Gambar 2.2 <i>Planning Decission Support System</i>	44
Gambar 2.3 Sistem Informasi Pendapatan Daerah	44
Gambar 2.4 e-keuangan	45
Gambar 2.5 Simpeg	45
Gambar 2.6 Temanggung Gandem.....	46
Gambar 2.7 Temanggung Gandem Pol.....	46
Gambar 2.8 Mapatda	46
Gambar 2.9 SIMPELBANGDA	47
Gambar 2.10 SIMWAS.....	47
Gambar 2.11 e-SAKIP.....	48
Gambar 3.1 Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	79
Gambar 3.2 Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024	80
Gambar 3.3 Pelaksanaan Assesmen Unit Layanan Disabilitas DINDIKPORA Kabupaten Temanggung Tahun 2024	80
Gambar 3.4 Peraih Medali Emas Karate Putri POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat Tahun 2024.....	85
Gambar 3.5 Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan bagi Atlet Pelajar Berprestasi Juara 1 Liga 1 Putri MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Kabupaten Temanggung Tahun 2024	85
Gambar 3.6 Berkontribusi Dalam Acara Kadang Temanggungan di Jakarta	88
Gambar 3.7 Nyadran Jaran Kepang Temanggungan di Jakarta.....	88
Gambar 3.8 Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila	92
Gambar 3.9 Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	95
Gambar 3.10 Pelaksanaan Saka Bhakti Husada (SBH)	95
Gambar 3.11 Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan skrining kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung	96

Gambar 3.12	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan masalah gizi untuk penurunan stunting di Kab. Temanggung.....	96
Gambar 3.13	Kegiatan Jambore Kesehatan Kader Posyandu.....	103
Gambar 3.14	Kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPC IWAPI Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029	103
Gambar 3.15	Kegiatan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG).....	104
Gambar 3.16	Pemantauan Harga-Harga.....	113
Gambar 3.17	Operasi Pasar.....	119
Gambar 3.18	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	127
Gambar 3.19	Pelatihan Youtube	133
Gambar 3.20	Pembangunan Tanggul	137
Gambar 3.21	Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan	139
Gambar 3.22	Penanaman Pohon.....	142
Gambar 3.23	Gelar Pasukan pada Apel Siaga Persiapan Natal dan Tahun Baru.....	144
Gambar 3.24	Upacara Gelar Pasukan pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.....	145
Gambar 3.25	Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2024.....	151
Gambar 3.26	Dokumentasi Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur.....	163
Gambar 3.27	Dokumentasi Kegiatan pencanangan Zona Integritas.....	173
Gambar 3.28	Pelayanan langsung kepada masyarakat	178

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1	IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 60
Grafik 3.2	IPM Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Wilayah Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024..... 60
Grafik 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024..... 64
Grafik 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024..... 68
Grafik 3.5	Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 76
Grafik 3.6	Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024 78
Grafik 3.7	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 82
Grafik 3.8	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 83
Grafik 3.9	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024..... 86
Grafik 3.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 – 2024..... 93
Grafik 3.11	Perkembangan IPG Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 99
Grafik 3.12	Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 99
Grafik 3.13	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2023 106
Grafik 3.14	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung..... 108
Grafik 3.15	Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2023 109

Grafik	3.16	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	109
Grafik	3.17	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023.....	114
Grafik	3.18	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	115
Grafik	3.19	Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini	116
Grafik	3.20	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024	121
Grafik	3.21	Capaian angka kemiskinan Tahun 2022 – 2024	122
Grafik	3.22	Perbandingan Angka Kemiskinan Tahun 2022 – 2024	123
Grafik	3.23	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023	124
Grafik	3.24	Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	124
Grafik	3.25	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya	129
Grafik	3.26	Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024	129
Grafik	3.27	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024	130
Grafik	3.28	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas.....	134
Grafik	3.29	Indeks Pembangunan Infrastruktur Komponen pembentuk indikator Persentase infrastruktur wilayah.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu upaya sistematis dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang orientasinya tidak hanya terbatas pada keluaran (*output*) yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, namun juga berorientasi pada hasil (*outcome*), yaitu berfungsinya keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. SAKIP juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil. Pelaporan kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan merupakan gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja oleh Pemerintah Daerah terdiri atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan diukur melalui target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi salah satu kunci dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

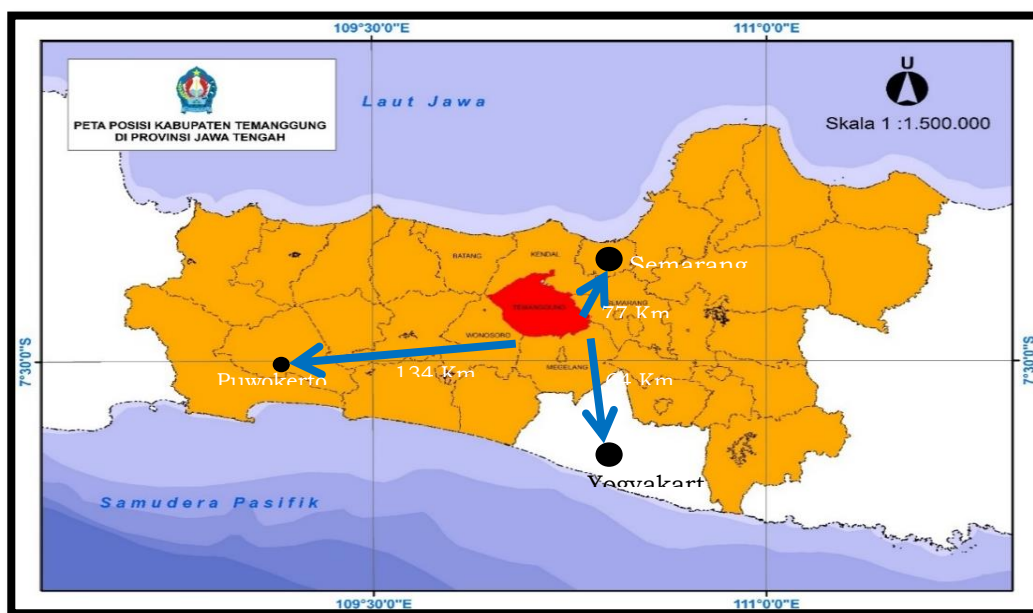
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan realisasi kinerja atas pelaksanaan anggaran tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 1.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap
Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat, Bulu
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candiroto, Wonobojo

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Pringsurat

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonoboyo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-
18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2. KONDISI TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahurju/Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang

terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kanda-ngan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

3. GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

4. KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 822.880 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 414.995 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 407.885 jiwa. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio
Jenis Kelamin di Setiap Kecamatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.761	50,78	24.974	49,22	50.735	6,17	1,032
2	Tembarak	16.608	51,10	15.890	48,90	32.498	3,95	1,045
3	Temanggung	42.387	49,72	42.858	50,28	85.245	10,36	0,989
4	Pringsurat	27.068	50,09	26.966	49,91	54.034	6,57	1,004
5	Kaloran	23.761	50,07	23.698	49,93	47.459	5,77	1,003
6	Kandangan	27.838	50,73	27.032	49,27	54.870	6,67	1,030
7	Kedu	31.063	50,56	30.380	49,44	61.443	7,47	1,022
8	Parakan	27.610	50,39	27.180	49,61	54.790	6,66	1,016
9	Ngadirejo	29.825	50,57	29.158	49,43	58.983	7,17	1,023
10	Jumo	15.777	50,28	15.602	49,72	31.379	3,81	1,011
11	Tretep	11.349	51,15	10.839	48,85	22.188	2,70	1,047
12	Candiroto	17.165	50,29	16.969	49,71	34.134	4,15	1,012

Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
13	Kranggan	25.524	49,80	25.734	50,20	51.258	6,23	0,992
14	Tlogomulyo	12.126	50,97	11.666	49,03	23.792	2,89	1,039
15	Selopampang	10.693	50,66	10.414	49,34	21.107	2,57	1,027
16	Bansari	12.769	50,91	12.311	49,09	25.080	3,05	1,037
17	Kledung	14.718	50,83	14.240	49,17	28.958	3,52	1,034
18	Bejen	11.211	50,61	10.942	49,39	22.153	2,69	1,025
19	Wonoboyo	13.979	50,77	13.553	49,23	27.532	3,35	1,031
20	Gemawang	17.763	50,40	17.479	49,60	35.242	4,28	1,016
Jumlah		414.995	50,53	407.885	49,47	822.880	100	1,017

Sumber: DINDUKCAPIL Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki (50,53%) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (49,47%).

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Tidak sekolah/ belum sekolah	Belum tamat SD/sederajat	Tamat SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II	Akademik/Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
1	Bulu	13.582	14.442	9.660	6.215	5.078	137	422	1.141	57	1
2	Tembarak	11.140	5.246	6.675	4.888	3.494	112	170	740	27	6
3	Temanggung	20.376	10.853	14.785	11.111	18.338	634	2.067	6.602	464	15

4	Pringsurat	17.871	4.006	11.869	10.935	7.612	169	322	1.199	49	2
5	Kaloran	18.830	5.076	10.075	7.212	4.840	186	246	964	29	1
6	Kandangan	24.290	6.592	9.995	7.112	5.256	211	318	1.049	41	6
7	Kedu	17.885	13.689	12.153	7.714	7.261	284	577	1.793	86	1
8	Parakan	17.113	8.917	9.009	7.264	9.014	274	787	2.278	124	10
9	Ngadirejo	13.373	9.706	15.670	10.875	7.066	251	535	1.472	34	1
10	Jumo	10.476	5.427	6.848	4.424	3.062	153	244	718	25	2
11	Tretep	7.709	4.615	5.900	2.903	813	41	49	150	7	1
12	Candiroto	7.486	9.059	8.140	4.502	3.529	193	342	861	20	2
13	Kranggan	15.943	7.399	8.585	9.476	7.672	204	415	1.495	66	3
14	Tlogomulyo	6.990	4.548	5.788	3.754	2.171	46	125	357	10	3
15	Selopampang	5.597	3.436	5.530	3.275	2.558	72	131	496	10	2
16	Bansari	3.930	8.803	5.183	4.077	2.377	63	151	480	16	-
17	Kledung	11.594	4.107	6.893	4.004	1.952	38	99	260	10	1
18	Bejen	6.715	2.446	6.073	3.956	2.379	81	134	349	19	1
19	Wonobojo	8.542	3.579	8.196	4.723	1.930	81	110	360	10	1
20	Gemawang	13.000	7.209	7.807	4.334	2.260	87	134	397	13	1
Jumlah		252.442	139.155	174.834	122.754	98.662	3.317	7.378	23.161	1.117	60
persentase		30,68	16,91	21,25	14,92	11,99	0,40	0,90	2,81	0,14	0,01

Sumber: DINDUKAPIL Kabupaten Temanggung 2024

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 21,25%, kemudian jenjang SMP sebesar 14,92% dan jenjang SMA sebesar 11,99%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 sebesar 2,81% lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 2,67% tetapi angka ini masih relatif kecil. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena kemampuan ekonomi untuk mengakses biaya pendidikan serta baru ada 1 (satu) perguruan tinggi swasta di wilayah Kabupaten Temanggung, dan juga keinginan untuk bekerja setelah tamat SMA.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut:

a) Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan

7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d) Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Hak Protokoler dan Hak Keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2. PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- 6) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;

16. Kecamatan Gemawang;
17. Kecamatan Candiroti;
18. Kecamatan Bejen;
19. Kecamatan Wonobojo;
20. Kecamatan Tretep;

Selain perangkat daerah diatas ada unit pelaksana kebencanaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UOBK (Unit Organisasi yang Bersifat Khusus) yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPT Laboratorium Kesehatan;
2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
4. UPT Laboratorium Lingkungan
5. UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPT Rumah Singgah;
7. UPT Balai Benih Pertanian.
8. UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPT Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPT Metrologi Legal; dan
12. UPT Balai Latihan Kerja.

Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah diatas masih ada unit organisasi bersifat fungsional yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung, Puskesmas di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Puskesmas Parakan;
2. Puskesmas Bulu;
3. Puskesmas Temanggung;
4. Puskesmas Dharma Rini;
5. Puskesmas Kedu;
6. Puskesmas Traji;
7. Puskesmas Kledung;
8. Puskesmas Bansari;
9. Puskesmas Tlogomulyo;
10. Puskesmas Tembarak;
11. Puskesmas Selopampang;
12. Puskesmas Pringsurat;
13. Puskesmas Kranggan;
14. Puskesmas Pare;
15. Puskesmas Kaloran;
16. Puskesmas Tepusen;
17. Puskesmas Kandangan;
18. Puskesmas Ngadirejo;
19. Puskesmas Jumo;
20. Puskesmas Gemawang;
21. Puskesmas Candirot;
22. Puskesmas Bejen;
23. Puskesmas Tretep;
24. Puskesmas Wonoboyo;
25. Puskesmas Rejosari; dan
26. Puskesmas Banjarsari.

3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Profil Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Temanggung

No.	JENIS DATA	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Jumlah PNS	6.280	5.865	6.345	5.908	5.526
	1. Golongan I	292	268	208	120	68
	2. Golongan II	903	858	1.312	1.261	1.224
	3. Golongan III	3.394	3.264	3.543	3.451	3.324
	4. Golongan IV	1.691	1.475	1.282	1.076	910
II.	Jumlah Pejabat Struktural	624	625	466	478	457
	1. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	29	27	31	31	29
	2. Eselon III (administrator)	151	154	152	151	144
	3. Eselon IV (Pengawas)	444	444	283	296	284
III.	Jumlah PNS	6.280	5.865	6.345	5.910	5.526
	Laki-Laki	2.743	2.516	2.524	2.287	2.110
	Perempuan	3.537	3.349	3.821	3.623	3.416
IV.	JUMLAH PPPK	0	222	1.682	2.180	2.560
	1. Gol 5	0	92	477	50	52
	2. Gol 7	0	130	205	1.659	24
	3. Gol 9	0	222	1.182	1.709	2.484
V.	JUMLAH PPPK	0	222	1.682	2.180	2.560
	LAKI-LAKI	0	92	477	572	760
	PEREMPUAN	0	130	1.205	1.608	1.800
	JUMLAH TOTAL ASN	6.280	6.087	8.027	8.088	8.086

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas Jumlah ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sejumlah 8.086 orang yang terdiri dari 5.526 PNS dan 2.560 PPPK. Terjadi kenaikan jumlah PPPK dari tahun 2023 sejumlah 2.180 menjadi 2.560 pada tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun dimana jumlah PNS terendah jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.

4. Capaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adanya untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat.

Dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2024

No.	Penilaian	Bobot	2023	2024
1	RB General	100	62,13	74,79
2	RB Tematik	20	6,92	11,22
3	Indeks RB	120	69,05	86,01
	Kategori		B	A-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 sebesar 69,05 dengan kategori "B". Sementara untuk tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi RB yang dilakukan oleh

Kementerian PANRB bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh Indeks RB sebesar 86,01 dengan kategori "A-".



KEMENTERIAN
panrb

Selamat datang,
temanggung.d140.2
Kabupaten Temanggung

Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung

RB General Awal	74.79
Koefisien	0
RB General	74.79
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	74.79
RB Tematik	11.22
Index RB	86.01

Gambar 1.2
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

D. ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung tahun 2024 gambaran dan analisis kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun isu isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan angka pendukung adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan pengeluaran real perkapita. Kualitas

pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung masih harus ditingkatkan, hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah yang baru tercapai 7,53 tahun dan belum sesuai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) yaitu 12 tahun. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi mutlak diperlukan karena tuntutan perkembangan jaman agar tidak tertinggal dengan daerah lain, hal ini dipengaruhi adanya revolusi industri 4.0 dan revolusi *society* 5.0. Keduanya mengedepankan pemanfaatan teknologi dalam semua aspek kehidupan baik di lingkup pemerintahan maupun di kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah beserta jajaran aparatnya dituntut inovatif, adaptif, transparan, dan digitalisasi dalam semua aspek. Sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu menutup celah korupsi, pelayanan publik lebih efektif, efisien, murah, transparan, mudah dan akuntabel. Dukungan infrastruktur baik lunak maupun keras sangat dibutuhkan sehingga mendukung kompetensi ASN dan implementasi *e-government*.

Manusia yang berdaya saing tinggi tidak lepas dari derajat kesehatannya, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi dan anak. Kondisi kesehatan ibu yang kurang bagus bisa berdampak terjadinya stunting sehingga dalam rangka menurunkan angka stunting dikerahkan semua stakeholders dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Hal lainnya yang menjadi tantangan adalah pemenuhan hak anak seutuhnya sehingga semua anak bisa tumbuh dan berkembang optimal dan menjadi calon generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga bisa ditinjau dari sisi

ketenagakerjaan, yaitu tidak adanya gap antara ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja. Kabupaten Temanggung walaupun angka TPT nya termasuk bagus pada tahun 2024 yaitu tercapai 2,35% namun masih ada sebagian masyarakat yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan, hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sehingga suatu saat jika terjadi bonus demografi akan menguntungkan jika kualitas tenaga kerjanya bagus, jika kualitas tenaga kerjanya rendah akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Pembangunan pemuda menjadi tantangan tersendiri sehingga pemuda mampu berdaya saing tinggi baik dari sisi pendidikan, perekonomian dan ketenagakerjaan.

2. Pemulihan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi *Covid-19* sehingga masih dibutuhkan percepatan pemulihan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya investasi, tingginya inflasi dan kurangnya pemakaian produk dalam negeri serta keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana kewilayahan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan terbesar adalah adanya kemiskinan di Kabupaten Temanggung karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai stakeholders non pemerintah sehingga penanganannya terpadu dan bisa terwujud 0% kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Potensi industri di Kabupaten Temanggung ada di wilayah Kecamatan Kranggan dan Pringsurat, menyerap banyak tenaga kerja dari Kabupaten Temanggung dan sekitarnya, namun kondisi saat ini terjadi peningkatan pengangguran (terjadinya PHK) sebagai dampak pandemi *Covid-19* pada dunia industri, hal ini

berdampak pada perekonomian daerah.

Perekonomian di Kabupaten Temanggung tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu yaitu (1) Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan (4) Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024). Peningkatan kualitas dan percepatan pertumbuhannya diupayakan pada beberapa sektor sehingga mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan dalam kondisi baik (distribusi barang dan jasa), tercukupinya akses pendidikan, akses kesehatan, akses komunikasi, akses perumahan dan permukiman, pemenuhan air bersih buat masyarakat di seluruh kecamatan dan desa sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah dan semua bisa tumbuh berkembang dengan baik sesuai potensinya masing-masing. Tantangan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif (dapat dirasakan semua lapisan masyarakat) dan memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan (dapat dirasakan oleh generasi berikutnya). Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan.

3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan aparatur pemerintah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri 4.0, revolusi *society* 5.0 dan era *disruption*.

Menghadapai tantangan revolusi industri 4.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu digitalisasi pelayanan publik di semua sektor, baik di tingkat

kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan. Tuntutan masyarakat adalah pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, tanpa batas waktu dan *excellent*. Menghadapi tantangan revolusi *society* 5.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu aparatur pemerintah yang mampu bekerjasama, berpikiran maju, bersih, mampu memanfaatkan teknologi dan berinovasi. Selain itu pemerintah daerah harus menginisiasi dan menjadi katalisator dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang berbasis teknologi.

Menghadapi tantangan era *disruption* pemerintah daerah harus mampu melakukan pelayanan berbasis digital namun tidak meninggalkan sisi kemanusiaan terutama pelayanan yang bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan masyarakat di era ini adalah adanya pemerintah yang lebih dekat, hadir dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga terwujud kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah harus mampu bersaing dengan pihak lain yang sama-sama melakukan pelayanan pada masyarakat (kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan komunikasi).

Isu strategis yang berkaitan langsung dengan program pusat adalah pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak pada Bulan Februari dan November Tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dan dilakukan berbagai persiapan sehingga dalam pelaksanaannya terwujud kelancaran sesuai tujuan Pilpres dan Pilkada. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah penyiapan anggaran, penyiapan masyarakat calon pemilih terutama pemilih pemula, hal ini dilakukan kolaborasi antara dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil, sekolah dan KPU sehingga pada saat siswa berumur 17 tahun administrasi terkait KTP sudah selesai dan bisa ikut berpartisipasi dalam

pilpres dan pilkada. Selain itu juga dilakukan persiapan guna pendidikan politik yang benar, mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif, persiapan SDM yang akan menjadi petugas, persiapan Linmas serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arah serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai target yang diinginkan. Dengan pengertian tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, melakukan proyeksi kondisi di masa datang secara efektif dan efisien sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja, sehingga Renstra menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPD Provinsi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat memaksimalkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,77 (Angka)
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,27 (%)
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B/>60-70 (Predikat/Nilai)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85 (Tahun)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6 (Tahun)
2	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18 (Angka)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,61 (Angka)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21 (Angka)
3	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	4,50 (Angka)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,71 (Tahun)
5	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,75 (Angka)
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	32,25 (Ribu Rp)
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8 (Angka)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Kemiskinan	8,5 (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,52 (%)
7	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95 (Angka)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,41 (Angka)
		Indeks Rasa Aman	4,62 (Angka)
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,5 (Angka)
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Merit System	0,50 (Angka)
10	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B >60-70 (Predikat/Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B>76,61-88,30 (Predikat/Nilai)

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Temanggung yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2024)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2024	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85 (tahun)	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6 (tahun)	Pendidikan
		2. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18 (angka)	Pemuda dan Olah Raga
			4. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,61 (angka)	Pemuda dan Olah Raga
			5. Indeks Pembangunan Kebudayaan	4,21 (angka)	Perpustakaan dan Kebudayaan
		3. Meningkatnya toleransi masyarakat	6. Indeks Toleransi	4,50 (angka)	Bankesbangpol
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,71 (angka)	Kesehatan
		5. Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,75 (angka)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2024)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2024	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	7. Meningkatnya Prekonomian Daerah	9. Pendapatan Perkapita	32,25 (ribu Rp)	Bidang Koperasi dan UKM, Pangan Kelautan dan Perikanan
			10. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8 (angka)	Bidang pertanian, Pangan, Kelautan Perikanan Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Penanaman modal Koperasi Usaha Kecil Menengah
			11. Angka Kemiskinan	8,5 (%)	Sosial
			12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,52 (%)	Tenaga Kerja
		8. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	13. Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95 (Angka)	PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,51 (Angka)	Lingkungan Hidup
			15. Indeks Rasa Aman	4,62 (Angka)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2024)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2024	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	9. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	16. IPKD	65,5 (Angka)	Fungsi Penunjang Perencanaan, Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, Penunjang Keuangan, Bidang Komunikasi dan
		10. Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	17. Indeks Merit System	0,50 (Angka)	Fungsi Penunjang Kepegawaian
		11. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	18. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B/>60-70 (Predikat /nilai)	Fungsi Lainnya Sekretaris Daerah, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD
			19. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B/76,61 –88,30 (Predikat /nilai)	Fungsi Lainnya Sekretaris Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
- c. Peningkatan literasi masyarakat;
- d. Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- e. Penurunan konflik di masyarakat;
- f. Meningkatkan kesehatan keluarga;
- g. Meningkatkan kebijakan reponsif gender.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan adalah:

- a. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan;
- b. Meningkatkan nilai usaha perdagangan;
- c. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata;
- d. Meningkatkan nilai usaha industri;
- e. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan;
- f. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM;
- g. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- h. Meningkatkan produksi perikanan;

- i. Meningkatnya pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
- j. Mengoptimalkan fungsi UPTD rumah singgah dalam pelayanan PPKS;
- k. Pertumbuhan penduduk yang terkendali; Pertumbuhan penduduk yang terkendali diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, karena akan mengurangi indeks ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif, sehingga akan menaikkan penghasilan dan investasi.
- l. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
- m. Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat;
- n. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja;
- o. Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- p. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya; Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan, yaitu kawasan budidaya yang diperuntukkan untuk industri, produksi, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- q. Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan indeks rasa aman yang tinggi, sehingga sangat mendukung terwujudnya iklim investasi.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN

Strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN adalah:

- a. Meningkatnya infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- c. Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat;

- d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah;
- e. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- g. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tertinggi;
- h. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
- i. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- j. Meningkatnya pengelolaan kearsipan;
- k. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- l. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual;
- m. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum;
- n. Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi;
- o. Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi;
- p. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- q. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- r. Meningkatnya layanan perhubungan;
- s. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan akses layanan Pendidikan	Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai
			Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum
			Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan
	Sasaran 2: Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olah raga
		Peningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
		Peningkatkan pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Pembudayaan gemar membaca di masyarakat
	Sasaran 3: Meningkatnya Toleransi di Masyarakat	Penurunan konflik di masyarakat	Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
			Peningkatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebhinekaan kepada masyarakat
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik
	Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan keluarga	Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas
			Transformasi pelayanan kesehatan primer
			Transformasi pelayanan kesehatan rujukan
			Transformasi sistem ketahanan kesehatan rujukan
			Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kebijakan responsif gender	Transformasi sumber daya kesehatan
			Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Sasaran 1: Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan	Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan
			Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan
			Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan
		Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
			Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal
		Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan nilai usaha industri	Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
		Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan	Peningkatkan pelayanan dan promosi Investasi
		Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
			Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
			Peningkatan penyediaan dan distribusi Pangan pokok atau pangan Lainnya
			Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
		Meningkatkan produksi perikanan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
			Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya pemberdayaan PPKS	Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama
			Optimalisasi fungsi UPTD Rumah Singgah dalam pelayanan PPKS
		Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Peningkatkan pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga
		Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat	Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes
	Sasaran 3: Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja
		Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
			Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
		Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya	Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya
			Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup
			Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan sampah
		Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan
			Peningkatan peran serta <i>Pentahelix</i> dalam perencanaan pembangunan
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat
		Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tertinggi	Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit
		Meningkatnya pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah
		Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Optimalisasi integrasi layanan sistem pemerintahan secara elektronik
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintahan secara Elektronik
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Peningkatan tata kelola arsip daerah
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
			Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	Peningkatan kualitas Kebijakan perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Peningkatan dukungan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan
		Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras Pelayanan Publik
		Meningkatnya layanan perhubungan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras layanan perhubungan
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarpras Administrasi Kependudukan

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Temanggung, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan:

- Program Pengelolaan Pendidikan

2) Bidang Kesehatan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengembangan Permukiman;
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Kawasan Permukiman;

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran;
- Program Penanggulangan Bencana.

6) Bidang Sosial

- Program perlindungan dan jaminan sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - Program Perlindungan Perempuan;
 - Program Pemenuhan Hak Anak/PHA.
- 3) Bidang Pangan:
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
- 4) Bidang lingkungan hidup:
 - Program Pengelolaan Persampahan.
- 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Program Pendaftaran Penduduk;
 - Program Pencatatan Sipil;
 - Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - Program pengelolaan profil kependudukan.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa.
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - Program pengendalian penduduk;
 - Program pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
 - Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 8) Bidang Komunikasi dan Informatika:
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Program aplikasi informatika.
- 9) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
- 10) Bidang Penanaman Modal:
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 11) Bidang Kepemudaan dan Olahraga:
 - Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
- 12) Bidang Kebudayaan:
 - Program Pengembangan Kebudayaan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan:

- 1) Bidang kelautan dan perikanan:
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 2) Bidang Pariwisata:
 - Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- 3) Bidang Pertanian:
 - Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
- 4) Bidang Perindustrian:
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- 1) Perencanaan:
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Keuangan:
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan:
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 4) Penelitian dan Pengembangan:
 - Program Penelitian dan Pengembangan.
- 5) Sekretariat Daerah:
 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Program Perekonomian dan Pembangunan;
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- 1) Inspektorat daerah:
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan.

f. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan:

- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
- Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung mengacu pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, dokumen RKT Tahun 2024, dokumen RKPD Tahun 2024, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/370 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

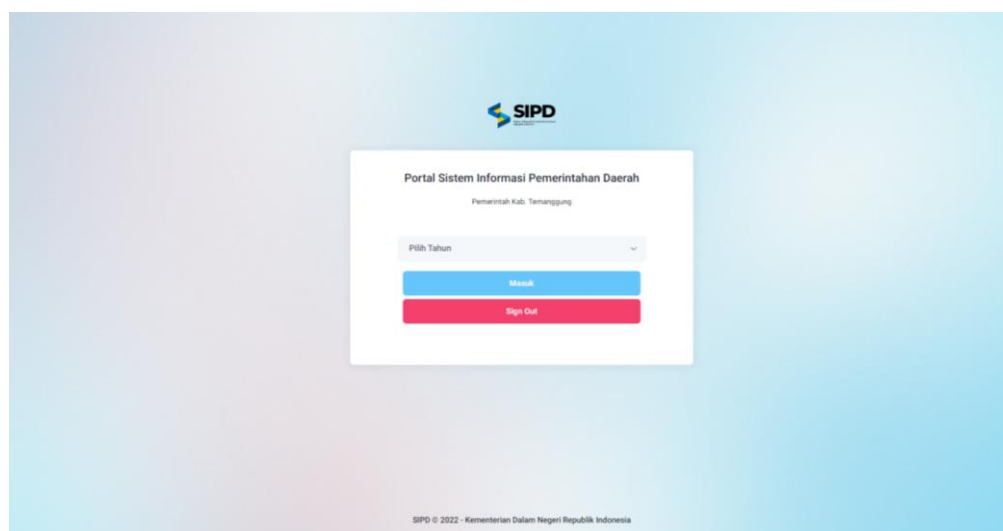
Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MONITORING EVALUASI

a. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini dibangun oleh pemerintah Pusat (Kemendagri) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini perangkat daerah dipaksa untuk melakukan perencanaan dengan teliti dan cermat dan tidak akan ada lagi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan. SIPD dirancang untuk digunakan dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada monitoring evaluasi. Sehingga dengan sistem ini daerah memudahkan untuk melaksanakan dan menyelaraskan pembangunan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasinya.



Gambar 2.1
SIPD

b. *Planning Decision Support System (Planning DSS)*

Merupakan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan para verifikator Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sistem ini menyajikan informasi tentang data aset, jumlah SDM dan informasi pengendalian kegiatan tiap perangkat daerah.

ID	Kode Barang	Nama/Rupa Barang/Perbaikan	Nama Register	Mark Type	Uraian CC	Bahan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Rangka	Mesin	Polisi	SPKD	Asah	Jumlah	Harga (Rp)	Keterangan
1	6203010501	Sepeda Motor			125 CC	besi	05-10-2014	2	MH1JEN110EK054413	JBN1E1054481	AA-022 PE	05-10-2014	APED	1	15.221.900	Operasi tahun 2014 BAHAN PESENYAAN PERUSAHAAN DAERAH
1	6203010501	Sepeda Motor			125 CC	besi	06-10-2014	-	MH1JEN110EK054261	JBN1E1054477	AA-020 PE	-	APED	1	15.221.900	Operasi tahun 2014 BAHAN PESENYAAN PERUSAHAAN DAERAH
1	6203010501	Sepeda Motor			113 CC	besi	12-08-2015	2	MH3JUE1110FJ0011502	E3R0E0011312	AA-020 PE		APED	1	14.625.000	Operasi tahun 2015 BAHAN PESENYAAN PERUSAHAAN DAERAH
1	6203010501	Sepeda Motor			113 CC	besi	12-08-2015	2	MH3JUE1110FJ0011150	E3R0E0005206	AA-020 PE		APED	1	14.625.000	Operasi tahun 2015 BAHAN PESENYAAN PERUSAHAAN DAERAH

Gambar 2.2
Planning Decision Support System

2. PELAKSANAAN

a. SIAP PAKDE: Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sistem ini membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan penerimaan sampai pelaporan pendapatan daerah.

BPMPAD Kabupaten Temanggung

Layanan Pajak Daerah
Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
DAFTAR NPWP BARU

Pembayaran via QRIS
Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS
ID Billing / NOP PBB P-2 **PROSES**

Informasi PBB P2
Masukkan NOP (18 digit) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda
NOP PBB P-2 **PROSES**

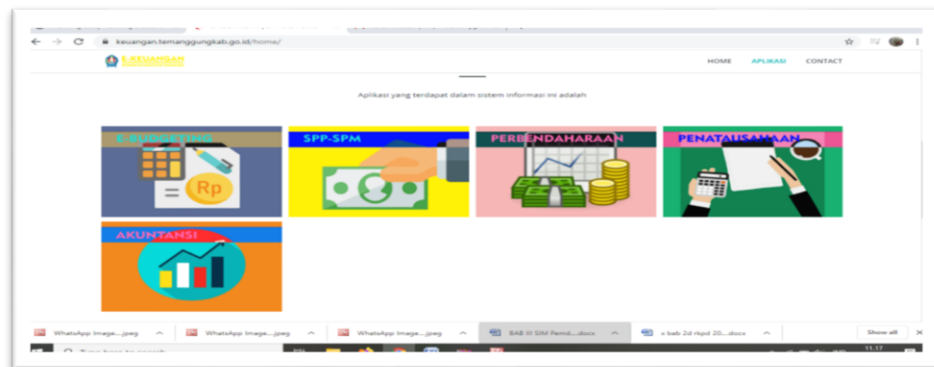
Billing Kolektif PBB
Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis PBB P2 (18 digit) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini
Kode Billing **PROSES**

Gambar 2.3
Sistem Informasi Pendapatan Daerah

b. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan pengeluaran sampai akuntansi dan pelaporan

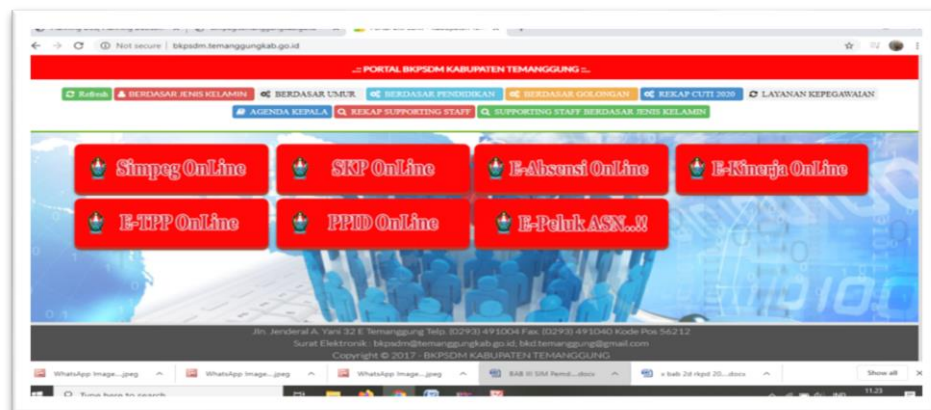
keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.4
e-keuangan Temanggung

c. Simpeg

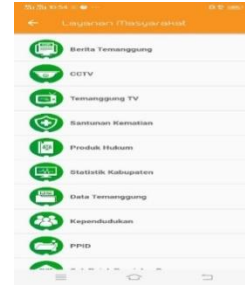
Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.



Gambar 2.5
Simpeg

d. Temanggung GANDEM

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung berbasis android yang merangkum pelayanan informasi publik, dan informasi potensi daerah.



Gambar 2.6
Temanggung Gandem

e. Temanggung Gandem Pol

Merupakan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis android.



Gambar 2.7
Temanggung Gandem Pol

f. Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah

Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.

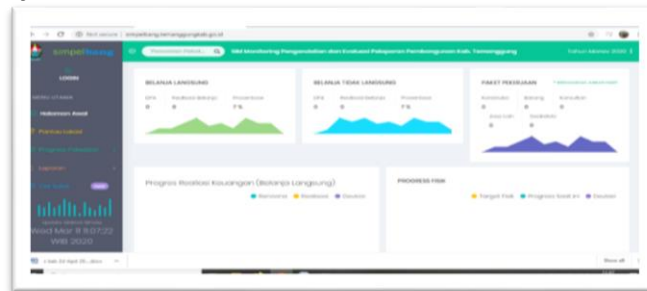


Gambar 2.8
Mapatda

3. PENGENDALIAN

a. SIMPELBANGDA: Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

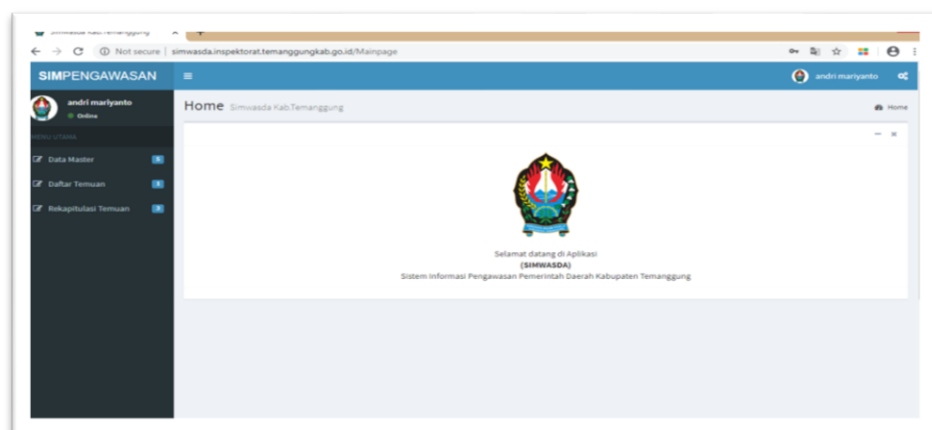
Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.



Gambar 2.9
Simpelbangda

b. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.

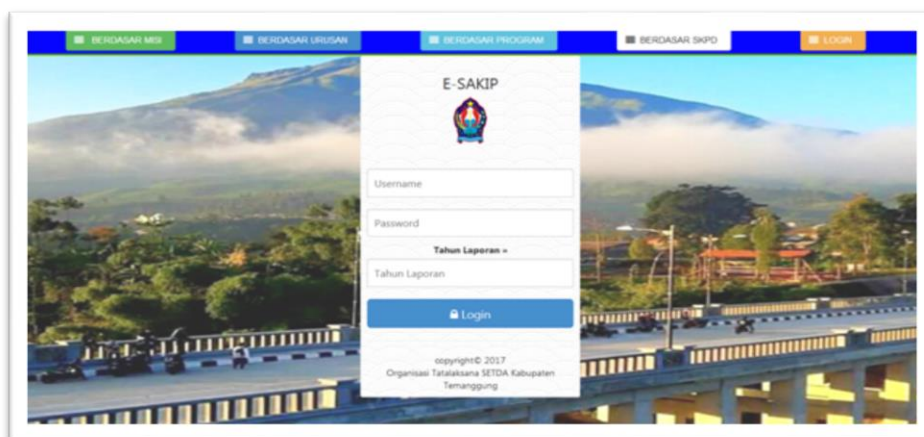


Gambar 2.10
SIMWAS

4. PELAPORAN

a. e- SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.11
e-SAKIP

I. PERENCANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD seiring dengan adanya

perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan.

Perubahan APBD tahun 2024 juga dilakukan karena terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan mengatasi dampak badai El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan berpotensi menyebabkan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian terutama padi, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.098.911.972.717,- dan dengan adanya perubahan APBD tahun 2024 bertambah menjadi Rp. 2.202.443.373.410,-. Adapun komposisi belanja APBD Perubahan Tahun 2024 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Per Program Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	510.723.639.116
2	Program Pengelolaan Pendidikan	190.204.001.965
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.495.340.756
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	254.665.515.681
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.327.703.000
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.344.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.867.179.400

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.691.207.894
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.767.238.882
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.469.879.000
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.351.000.000
13	Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.820.000.000
15	Program Penyelenggaraan Jalan	33.003.168.000
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000
17	Program Pengembangan Perumahan	1.010.076.140
18	Program Kawasan Permukiman	8.032.124.790
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.186.470.749
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.680.713.000
21	Program Penanggulangan Bencana	1.703.174.000
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.612.679.000
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.100.641.003
24	Program Pemberdayaan Sosial	190.000.000
25	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000
26	Program Rehabilitasi Sosial	974.667.400
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.344.461.715
28	Program Penanganan Bencana	1.770.000.000
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	200.000.000
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.413.200
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	800.000.000
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	240.000.000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
33	Program Hubungan Industrial	65.000.000
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.489.938.912
35	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000
36	Program Perlindungan Perempuan	75.000.000
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.000.000
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	10.000.000
39	Program Perlindungan Khusus Anak	95.000.000
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.497.861.392
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.751.561.989
44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000
45	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	452.954.550
46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.387.500.000
47	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.738.800
48	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000
49	Program Pengelolaan Persampahan	9.127.499.700
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.506.996.881
51	Program Pendaftaran Penduduk	750.000.000
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	270.000.000
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.460.744.179
54	Program Penataan Desa	15.000.000
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.848.000.000
56	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
57	Program Pengendalian Penduduk	423.256.000
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.301.754.000
59	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.273.400.000
60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.106.660.740
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.817.280.000
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.879.655.466
63	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.393.331.100
64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.033.508.625
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.170.302.910
66	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	25.000.000
68	Program Pengembangan UMKM	50.000.000
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.545.941.100
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000
71	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.246.985.800
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.095.000.000
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250.000.000
77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	102.832.500
78	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	112.500.000
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.103.136.130
80	Program Pengembangan Kebudayaan	11.155.000.000
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.929.312.271

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
82	Program Pembinaan Perpustakaan	1.181.189.000
83	Program Pengelolaan Arsip	199.300.000
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	200.000.000
85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	154.250.000
86	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.045.020.343
87	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.107.730.900
88	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	751.500.000
89	Program Penyuluhan Pertanian	250.000.000
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.161.303.300
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.000.000
92	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20.000.000
93	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	610.000.000
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.092.881.268
95	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.203.785.700
96	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.314.108.422
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.391.732.066
98	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.104.093.751
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.913.244.801
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.213.782.500
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	543.500.000
102	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.672.100.882
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	400.481.412.125
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	686.018.000
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.448.876.102

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
	Kabupaten/Kota	
107	Program Kepegawaian Daerah	1.266.019.500
108	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	601.700.000
109	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	353.999.400
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.350.066.506
111	Program Penyelenggaraan Pengawasan	539.745.300
112	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	365.840.000
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.236.917.097
114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.039.847.190
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12.552.562.750
116	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	340.789.650
117	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	368.907.000
118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.371.215.726
119	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	565.000.000
120	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.489.283.995
121	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	185.000.000
122	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	569.500.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian pembangunan serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil dari pengukuran akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan)
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	100	71,04	71,86	100
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	5,27	5,04	95,64%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	100	B/>60-70	86,01	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, KemenPANRB, 2024.

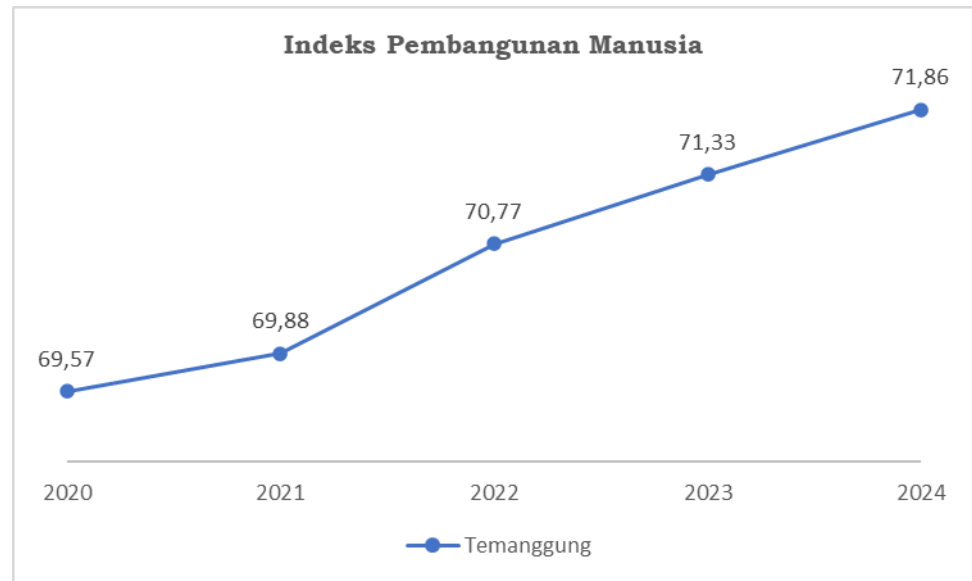
Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan proses perluasan pilihan dari manusia itu sendiri. Esensi utama dari pilihan tersebut adalah agar manusia dapat hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak (UNDP, 1990). Indeks komposit yang mengukur Pembangunan manusia dijelaskan dan diperkenalkan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup yang layak.

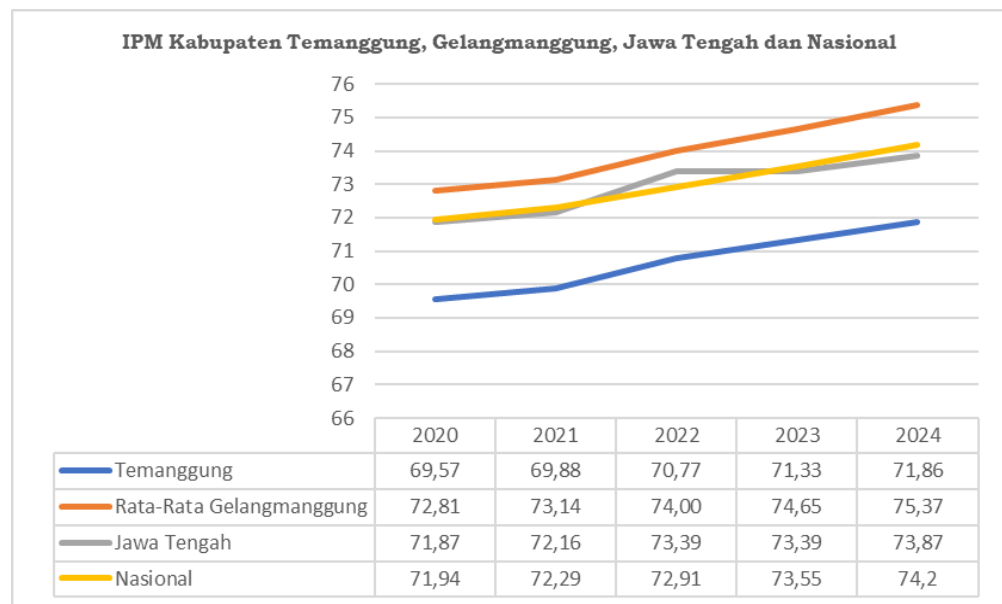
Kinerja Pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan IPM tersebut, demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja Pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung. Capaian IPM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus membaik, meskipun berada dibawah capaian rata-rata Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung), provinsi dan nasional.

Grafik 3.1
IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Grafik 3.2
IPM Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Wilayah Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan capaian diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan akan tetapi masih berada dibawah capaian rata-rata wilayah Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 71,86. Kenaikan IPM pada tahun 2024 salah satunya didorong oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat yang tumbuh dengan baik serta dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang meningkat. Namun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah dimensi pengetahuan yang perlu upaya lebih guna meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024 secara rinci disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,58	75,64	75,7	75,77	75,94
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,14	12,08	12,55	12,61	12,62
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,24	6,94	7,41	7,50	7,53
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	9.343	9.142	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/ sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang

mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat (BPS, 2024).

Disisi lain, kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2024 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 75,94 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp 10.519.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan

dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

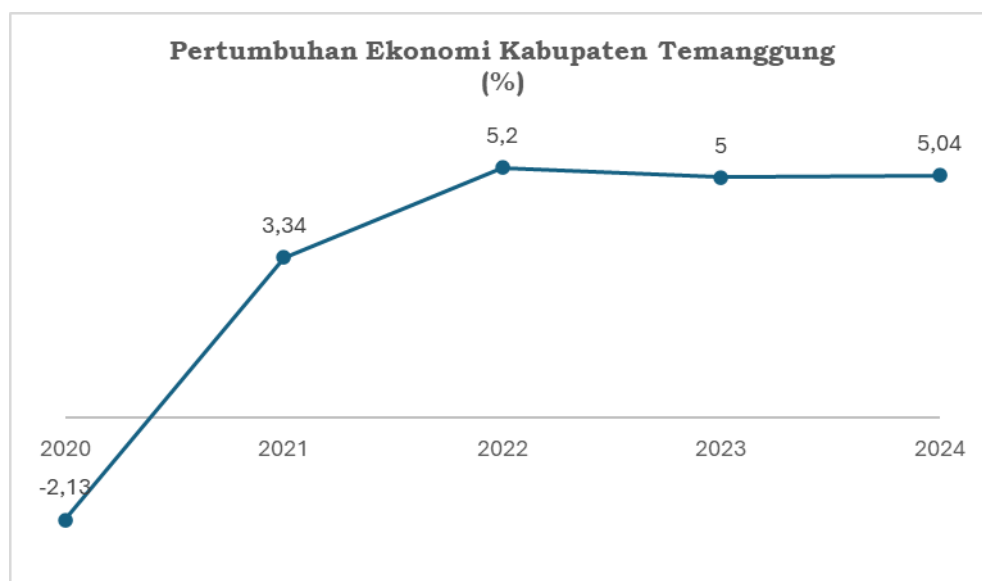
Apabila melihat capaian IPM Kabupaten Temanggung saat ini, masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan Pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

2) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebesar 5,04 persen yang mengalami pertumbuhan 0,8 dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024.

Pada tahun 2020 perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negative (<0) akibat pandemi Covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34 persen. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini pada tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20 persen, dan melambat -0,2 menjadi 5,00 persen, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 5,03 persen dari tahun 2023.

Seiring waktu berjalan sejak berakhirnya pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Temanggung menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan nilai PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 28.920.000 miliar rupiah, secara nominal, angka PDRB ini mengalami peningkatan 2.007,68 miliar rupiah dibandingkan tahun 2023 sebesar 26.912,32 miliar rupiah (BPS, 2024).

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 17.855,58 miliar. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024).

Tabel 3.4
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalian	118,76	126,77	121,77	125,57	131,31
C	Industri Pengolahan	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
F	Konstruksi	749,62	806,12	836,12	901,12	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56	907,26	978,95	1.035,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,86	502,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,6	532,07
L	Real Estate	134,87	137,94	145,94	158,14	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00	401,33	421,83	455,64
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,28	198,27	214,78	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,57	321,56	356,76	388,26	414,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53	17.855,59

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu (1) Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan (4) Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024).

Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Konstruksi sebesar 13,47 persen, (2) Jasa Perusahaan mencapai 11,29 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mencapai 10,16 persen, dan (4) Informasi dan Komunikasi mencapai 9,91 persen.

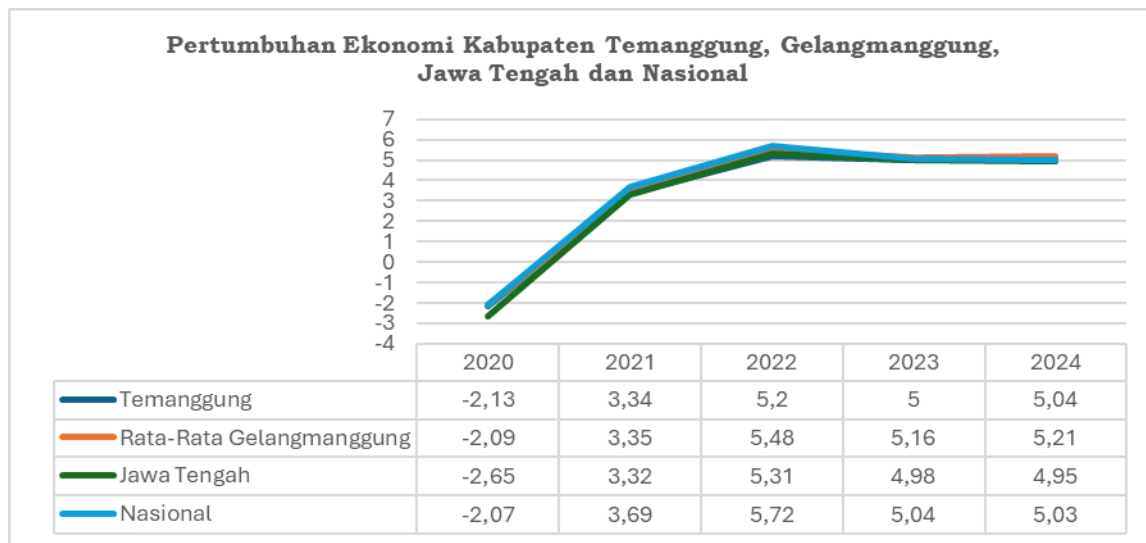
Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	0,86	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,75	-3,94	3,12	4,46
C	Industri Pengolahan	-0,62	2,00	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,87	4,84	5,26	5,86	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,77	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	7,40	4,30	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,59	2,37	65,39	7,90	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,10	2,32	5,80	8,36	7,70
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,01	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,60	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	0,59	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,22	0,98	10,95	8,83	6,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-2,13	3,34	5,20	5,00	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024.

Selain Kabupaten Temanggung, perlu juga melihat capaian pertumbuhan ekonomi baik di wilayah Gelangmanggung, maupun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional guna mengetahui kondisi saat ini.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-Rata
Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024.

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode tahun 2020 s.d. 2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah)
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02	6.498,19
B	Pertambangan dan Penggalian	194,99	210,32	208,32	221,12	230,92
C	Industri Pengolahan	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71	7.384,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,54	17,21	18,20	19,46	21,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,51	17,61	17,91	18,88	20,12
F	Konstruksi	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25	1.743,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46	6.039,62
H	Transportasi dan Pergudangan	679,50	718,50	1.256,77	1.477,28	1.589,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329,87	356,76	427,39	475,63	534,53
J	Informasi dan Komunikasi	366,50	388,56	398,56	444,36	490,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	708,79	769,23	841,11	884,52	931,98
L	Real Estate	165,41	171,05	184,41	201,91	219,02
M,N	Jasa Perusahaan	81,44	84,89	93,62	106,02	121,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	574,17	599,52	645,12	718,55
P	Jasa Pendidikan	1.075,52	1.118,47	1.143,37	1.234,27	1.358,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,38	287,61	299,99	332,09	370,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	415,39	423,32	489,22	549,22	596,93
	PDRB	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32	28.923,60

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung sebesar 28.923,60 milyar lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 sektor industri sebagai penyokong Kabupaten Temanggung diantaranya (1) industri pengolahan sebesar 25,53 persen, (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen, (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,88 persen, dan (4) konstruksi sebesar 6,03 persen.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Pelaksanaan RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas hal tersebut, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
- c. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 3.7
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 – 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 – 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 – 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 – 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 masih menggunakan angka Tahun 2023 dikarenakan belum rilis. Capaian penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d. 2024

No.	TAHUN	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2020	62,70	64	97,96%
2	2021	63,42	64	99,09%
3	2022	64,61	64,5	100
4	2023	69,05	65	100
5	2024	86,01	B>60-70	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung 2025

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Komponen	Tahun	
		2023	2024
1	RB General	62,13	74,79
2	RB Tematik	6,92	11,22
3	Total Nilai	69,05	86,01
4	Total Bobot RB General	100	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100	100
6	RB General Penyesuaian	62,13	74,79
Index RB		69,05	86,01

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2024

Indeks RB Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 86,01, angka ini meningkat signifikan dari Tahun 2023 sebesar 69,05. Meskipun hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Magelang sebesar 91,9, tetapi masih lebih tinggi dari Kabupaten Magelang yang sebesar 78,94. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, tetapi apa yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan, dan kedepan hal ini harus menjadi prioritas agar Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak nyata terhadap pembangunan. Hasil evaluasi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit. Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

TUJUAN 1

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Sasaran Strategis 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Sstrategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	96,15	7,85	7,53	95,92
2	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	100	12,60	12,62	100,00
Capaian Kinerja Sasaran			98,08			97,96

Sumber: BPS, DINDIKPORA Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) Indikator kinerja yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) turun dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 98,08% menjadi sebesar 97,96% meskipun kriterianya masih sama (**sangat tinggi**).

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,02 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,85). Jika dibandingkan dengan daerah Gelangmanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke tiga, di bawah Kabupaten Magelang (7,83) sebagaimana tabel berikut.

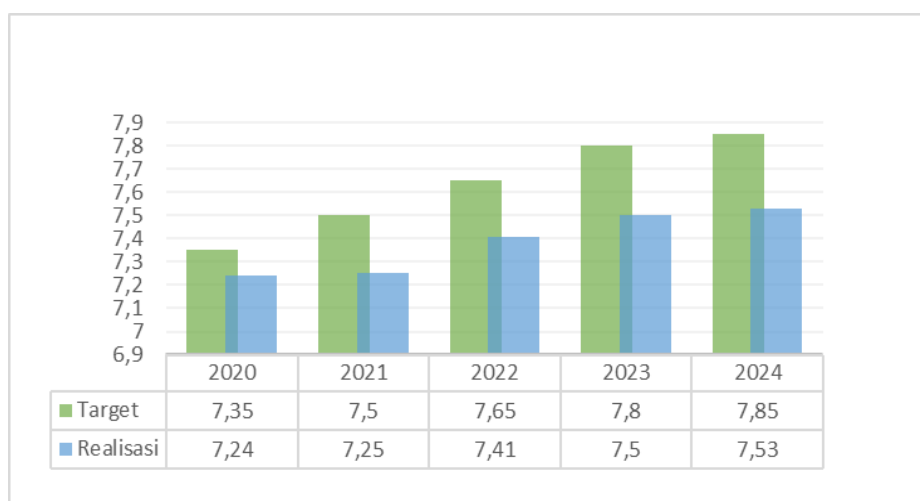
Tabel 3.11
Rata-rata Lama Sekolah di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Magelang	10,39	10,62	10,94	11,2	11,43
2	Kabupaten Magelang	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
3	Kabupaten Temanggung	7,24	7,25	7,41	7,50	7,53
	JAWA TENGAH	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02
	NASIONAL	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Program dan kegiatan mendukung Pendidikan non formal melalui Paket A, paket B, dan Paket C dan kegiatan untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB dan PKBM ini merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.

Grafik 3.5
Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun demikian realisasi tahun 2024 yang telah mencapai angka 7,53 belum mencapai target yang ditentukan dalam dokumen RPD sebesar 7,85 dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 3.12
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
Pada Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
Telah memiliki SPM (standar Pelayanan Minimal) bidang	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya	1. Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh,

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan • Adanya Bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu • Pemanfaatan output pendidikan yang menjadi standar sosial dan ekonomi • Pelaksanaan kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah	pemerataan akses kepada Pendidikan. 2. Masih terdapat siswa yang putus sekolah. 3. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, 4. Masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SP/MTs dan 5. Belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, 3. Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah, 4. Memprioritaskan Calon peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2024/2025 sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan yang dituju (SD : 7-12 Tahun; SMP : 13-15 Tahun)

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga melakukan verifikasi dan validasi data anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan menggunakan base data dari website *kemdikbud.go.id* yang melibatkan seluruh operator sekolah pada jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan. Disamping itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan disamping pemenuhan sarana prasarana yang terus dilakukan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung melaksanakan *asesmen* peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bekerja sama dengan psikolog untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Temanggung.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah (12,85) dan juga masih berada di bawah capaian Nasional (13,15). Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.6
Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2024

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah menggunakan penghitungan metode baru sejak tahun 2022 sebagaimana tercantum pada grafik di atas. Selama 5 tahun Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun demikian angka tersebut masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPD. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dibidang Pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Harapan Lama Sekolah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Telah memiliki SPM (standar Pelayanan Minimal) bidang Pendidikan sebagai	Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum optimal	1. Kegiatan peningkatan kualitas layanan pendidikan, sarana prasarana, pendidik dan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan 2. Tersedianya kegiatan peningkatan kualitas layanan pendidikan 3. Tersedianya kegiatan Peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan.		tenaga kependidikan dilaksanakan secara bertahap. 2. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik, 3. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik

Untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut, pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190,204,001,965,- dengan realisasi sebesar Rp. 178,940,748,502,- (94,08%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,92%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,96% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,08%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,88%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 3.1
Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari
Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3.2
Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosuli
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3.3
Pelaksanaan Assesmen Unit Layanan Disabilitas
DINDIKPORA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sasaran 2. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100,00	4,18	3,98	95,22
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	87,10	3,61	2,97	82,27
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	100	4,21	4,02	95,49
Capaian Kinerja Sasaran			95,70			90,99

Sumber: DINDIKPORA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

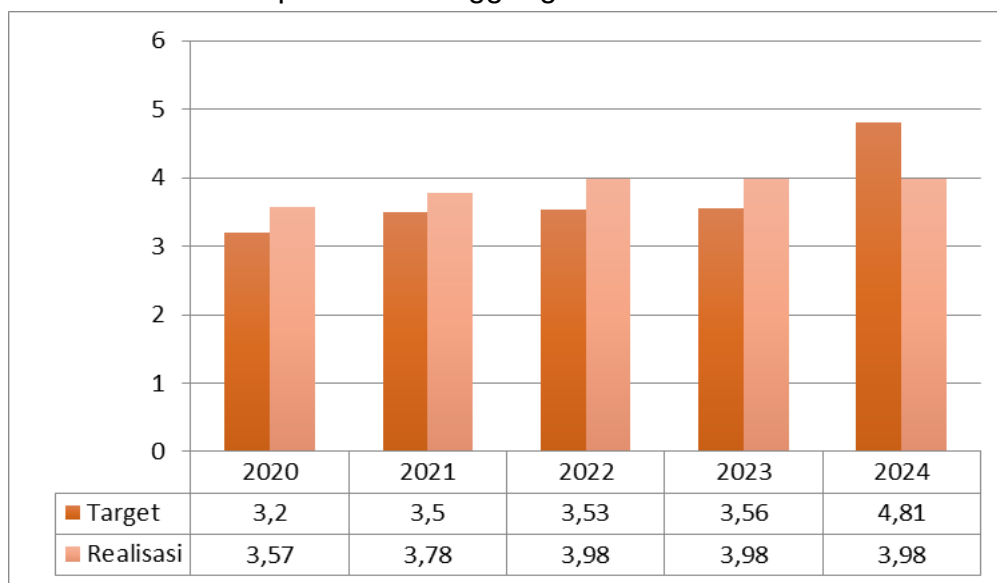
Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mencapai 90,99% (kategori **“Tinggi”**), turun bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 95,70%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena angka realisasi IPP dan IPO tahun 2024 merupakan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Bappeda melalui pihak ketiga pada tahun 2022 sehingga angkanya sama dengan capaian tahun 2023 sedangkan target terus naik. Dengan adanya pelimpahan dalam penghitungan beberapa Indeks, (diantaranya IPP dan IPO) kepada Perangkat Daerah teknis, maka mulai Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga melakukan penghitungan IPP dan IPO secara mandiri, namun sampai dengan akhir tahun 2023 data IPP dan IPO masih dalam tahap pengembangan aplikasi dan pengumpulan data dukung. Tahun 2024 penghitungan IPP dan IPO juga belum dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan data yang sesuai standar.

IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 95,22% sedangkan penghitungan IPP pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 73,87, sedangkan pada Tingkat

Nasional sebesar 56,33. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 95,22% sedangkan penghitungan IPP pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan realisasi pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 73,87 atau 100% dari target 56,85 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan realisasi IPP pada Tingkat Nasional sebesar 56,33 atau 97,68% dari target 57,67 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP, sehingga pada Tahun 2024 capaian IPP Kabupaten Temanggung berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi IPP pada tahun 2024 masih menggunakan angka tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan IPP oleh Dindikpora. Pada tahun 2024 realisasi IPP masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD, hal ini disebabkan oleh ketersediaan data yang akurat dan sesuai dengan indikator

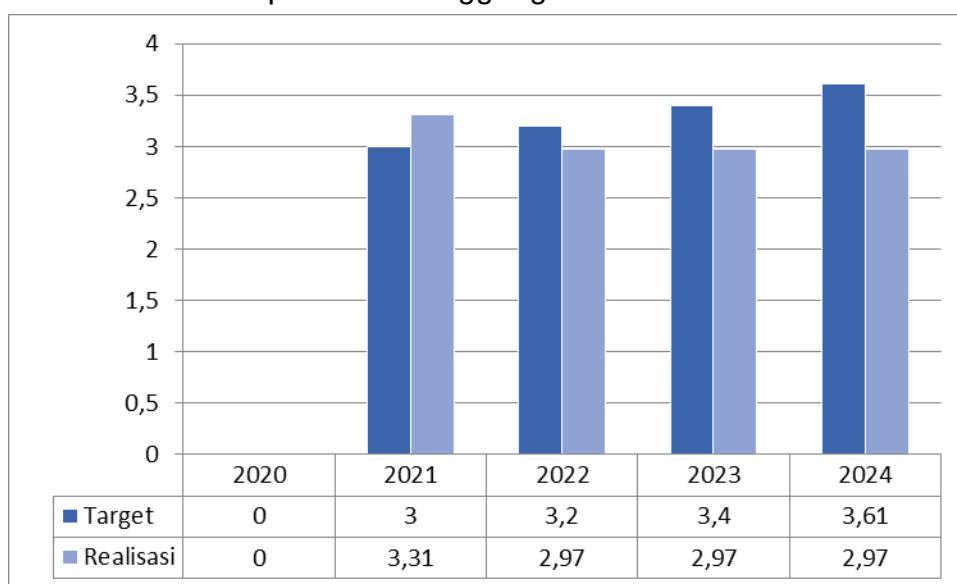
penghitungan rumus IPP yang telah ditetapkan oleh pusat. Kondisi IPP tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 3.15
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
Tersedianya anggaran, kegiatan kepemudaan yang menjadi perhatian dari Pemda	Belum tersedianya data yang akurat dan valid tentang data kepemudaan di kabupaten Temanggung	Penyusunan data base tentang kegiatan kepemudaan, Informasi Data Kepemudaan

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Grafik 3.8
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) mulai dilakukan penghitungan pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31).

Capaian IPO masih menggunakan angka Tahun 2022 dikarenakan mulai Tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan.

Pada tahun 2024 IPO tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapat fasilitasi penghitungan dari Provinsi melalui pihak ketiga. Kabupaten Temanggung melaksanakan pengumpulan data melalui metode sampling dengan format pendataan dari provinsi sehingga hasil dari penghitungan diketahui Kabupaten Temanggung mendapat skor 0,403 dari skala 0-1. Skor IPO Kabupaten Temanggung jika berada di atas skor IPO Nasional Tahun 2024 sebesar 0,334. Namun skor tersebut akan menjadi timpang jika disajikan dalam laporan capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dimana angka target masih menggunakan skala 1-5. Sehingga masih perlu dilakukan konversi.

Target IPO Tahun 2024 tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Tabel 3.16
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
Dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap kegiatan olahraga.	1. Keterbatasan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal 2. Masih minimnya pelatih yang berkompeten 3. Belum maksimalnya pendataan atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event.	1. Pembibitan atlet dari usia dini 2. Peningkatan kompetensi pelatih 3. Peningkatan kualitas sarpras pendukung olah raga 4. Pengiriman atlet Temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan. 5. Terdatanya atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung melalui informasi atlet yang akurat

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan tersebut pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.563.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.542.532.110,- atau 99,41% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp20.967.890,- atau

0,59%. Dari capaian kinerja 88,75% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,33%, maka tidak terjadi efisiensi. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program:

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.



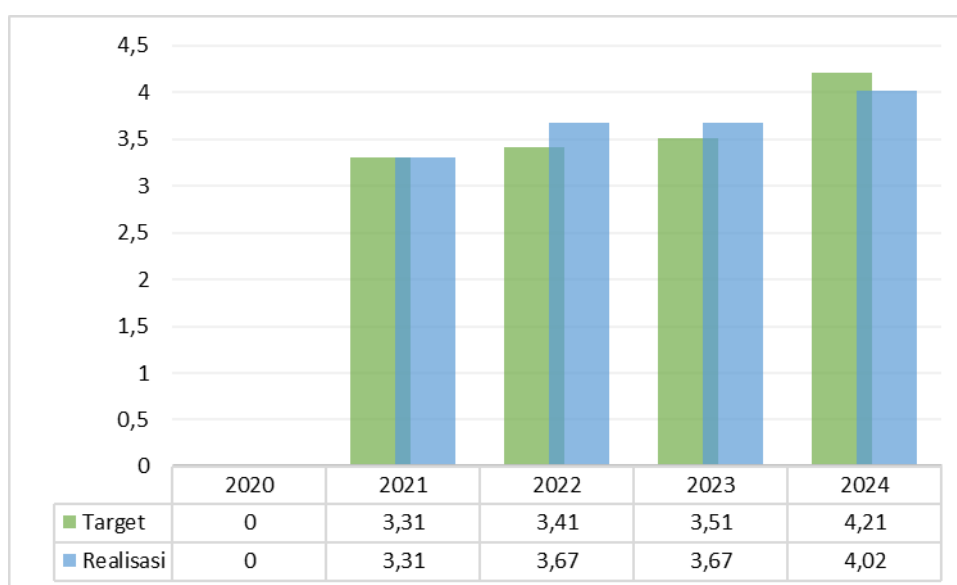
Gambar 3.4
Peraih Medali Emas Karate Putri
POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat
Tahun 2024



Gambar 3.5
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan bagi Atlet Pelajar Berprestasi
Juara 1 Liga 1 Putri
MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan.

Grafik 3.9
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 adalah 95,49% dengan realisasi sebesar 4,02 dari target 4,21 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya hambatan di variabel ekonomi budaya dan variabel budaya literasi.

Untuk saat ini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional belum merilis indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024, akan tetapi jika membandingkan dengan tahun 2023 yang diambil dari web ipk.kemdikbud.go.id dengan capaian nasional sebesar 57,13 dan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,89 maka capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Temanggung tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan perbedaan skala hasil pengukuran

dimana IPK Kabupaten Temanggung menggunakan skala 1-5 sedangkan IPK Provinsi dan Nasional menggunakan skala 1-100, sehingga masih membutuhkan konversi. Kondisi capaian IPK dipengaruhi faktor-faktor berikut.

Tabel 3.17
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
1. Digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru; 2. Solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong; 3. Masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung; 4. Mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.	1. Masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat; 2. Masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan fasilitas yang ada	1. Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian 2. Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian 3. Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah

Pencapaian target kinerja Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK) di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 sebagian besar hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.851.833.420,00 (97,28%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 303.166.580,00 atau (2,72%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 Kelompok Kesenian yang tidak dapat mencairkan uang hibah kesenian, dengan alasan :

- 3 kelompok sudah mendapatkan hibah di Perubahan APBD tahun 2023;
- 1 kelompok sudah mendapatkan hibah di APBD tahun 2024;
- 1 kelompok mundur atas kemauan kelompok sendiri; dan
- 3 kelompok ditunda karena adanya permasalahan internal;

2. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan rutin seperti :

- Anggaran honorarium Pejabat Pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekeratriat Daerah yang tidak diperbolehkan mendapatkan honor pengadaan Barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Terdapat uang yang tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak tersedia barang di *e-purchasing*;
- Sisa makan minum rapat;
- Uang sewa gedung tidak digunakan, dikarenakan kegiatan menggunakan gedung pemerintah (Graha Bumi Phala, aula PKK dan Sasana Budaya);
- Pengadaan pompa yang tidak dilaksanakan, cukup dengan perbaikan pompa lama.

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, jika dilihat dari realisasi anggaran yang sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,99% maka pada sasaran ini terjadi inefisiensi sumber daya sebesar 6,99%. Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan Bidang Kebudayaan:



Gambar 3.6 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggung di Jakarta



Gambar 3.7 Nyadran jaran kepang Temanggung di Jakarta

Sasaran 3. Meningkatnya Toleransi Masyarakat

Toleransi menjadi aspek yang lahir pada prinsip nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya nilai toleransi dalam prinsip bernegara juga menunjukkan pentingnya aspek ini dalam implementasi pembangunan. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak dari individu untuk bebas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas dan hak orang lain. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Terdapat dua domain variabel dalam indikator toleransi, yaitu toleransi agama dan toleransi suku. Penerapan Indikator Toleransi ini dilakukan untuk mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dinilai sangat relevan, mengingat adanya keberagaman agama dan suku yang ada di masyarakat Kabupaten Temanggung.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi Masyarakat adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya toleransi masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Toleransi	Angka	100	4,5	4,5	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber : BANKESBANGPOL Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa capaian kinerja sasaran 3 yaitu dengan indikator indeks toleransi pada tahun 2024 mencapai 100% (**sangat tinggi**). Ini menunjukkan bahwa toleransi masyarakat di Kabupaten

Temanggung sangat baik. Hal ini mengacu pada standar penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Nilai Persepsi Indeks Toleransi

Nilai persepsi	Nilai interval	Kinerja
1	< 1,8	Tidak baik
2	1,81 – 2,60	Kurang baik
3	2,61 – 3,40	Cukup baik
4	3,41 – 4,20	Baik
5	4,21 – 5,00	Sangat baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran 3 selama 3 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Toleransi	Angka	4,5	100
2023			4,5	100
2024			4,5	100

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran 3 tetap selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan karena Badan Kesbangpol tidak melakukan penghitungan indeks toleransi secara mandiri. Penghitungan indeks toleransi ini didasarkan pada hasil penghitungan Tim P5 Undip tahun 2022 yang bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Indikator indeks toleransi juga menjadi indikator Provinsi dan Nasional, yang merupakan hasil pengukuran Litbang Kemenag Republik Indonesia. Realisasi indeks toleransi pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 76,76 dan di tingkat Nasional sebesar 74,84. Perbedaan variabel dan *range* untuk perhitungan menjadikan indeks toleransi di Kabupaten Temanggung tidak bisa dibandingkan dengan indeks Toleransi di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Namun demikian indeks toleransi di Kabupaten Temanggung telah relevan mendukung indeks toleransi di tingkat Provinsi dan Nasional.

Keberhasilan tercapainya Indeks Toleransi di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 3.21
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Toleransi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Masyarakat yang agamis 2. Tingginya rasa tepo seliro (tenggang rasa/empati) pada masyarakat di Kab Temanggung 3. Hubungan kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat	1. Derasnya arus globalisasi yang mendorong pada individualisme 2. Kesibukan bekerja menyebabkan kurangnya interaksi antar warga 3. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih gadget	1. Meningkatkan koordinasi dengan Forkompimda untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, antar umat beragama, ras, dan golongan 2. Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) ntuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat 3. Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 4. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila 5. Pemberian sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan konflik sosial di masyarakat

Kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial;

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Toleransi pada tahun 2024 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas

sebesar Rp 32.413.958.995,00 dengan realisasi Rp 32.344.850.247,00 atau tercapai 99,79%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 69.108.748,00 atau 0,21%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,21% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,79%).



Gambar 3.8
Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila

Sasaran 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran 4

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	100	75,71	75,94	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Berdasarkan tabel diatas, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Tinggi**” yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

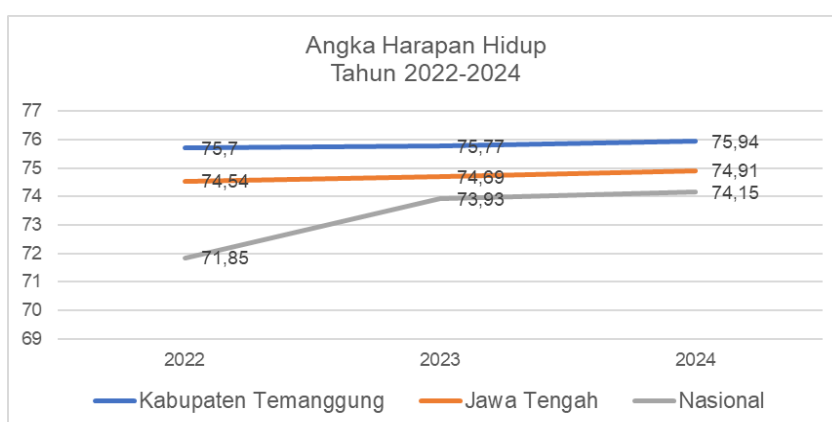
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung dalam kurun 3 tahun (2022-2024) cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tampak dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 4

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,70	100
2023	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,77	100
2024	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,94	100

AHH tahun 2024 mencapai usia 75,94 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 75,71 tahun (100%). AHH tersebut meningkat 0,17 bila dibandingkan dengan AHH pada tahun sebelumnya. AHH tersebut juga lebih tinggi 1.03 bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,91 tahun dan lebih tinggi 1,79 bila dibandingkan dengan AHH nasional yaitu 74,15 tahun. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota Gelangmanggung, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,54 tahun, dan lebih tinggi dari Kabupaten Magelang yang sebesar 74,68. Perkembangan AHH Kabupaten Temanggung terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.10
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan AHH Kabupaten Temanggung kecenderungannya meningkat dan relevan mendukung peningkatan AHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

AHH dipengaruhi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

Tabel 3.24
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Angka Harapan Hidup

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan serta jaminan kesehatan 2. Peningkatan perbaikan dan penyehatan lingkungan 3. Penanganan masalah gizi dan peningkatan asupan gizi yang baik, 4. Peningkatan tingkat kepedulian dan perawatan terhadap Kesehatan perorangan	1. adanya faktor risiko 4 T (terlalu muda; terlalu tua; terlalu dekat dan terlalu banyak) pada ibu; 2. Infeksi pada ibu hamil dan bayi, dan 3. Keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan pertolongan persalinan	1. Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat. 2. Pelaksanaan SBH In Action dalam rangka Penerapan Germas dan Pencegahan Penyakit Prioritas. 3. Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan <i>skrining</i> kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. 4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita dengan masalah gizi untuk penurunan stunting di Kabupaten Temanggung. 5. Pemeriksaan kualitas air untuk peningkatan akses air bersih bagi Masyarakat. 6. Pelaksanaan posyandu ILP (Integrasi layanan primer) siklus hidup dalam rangka pendekatan akses dan peningkatan mutu layanan Kesehatan 7. Kelas ibu balita dalam rangka penurunan AKABA (Angka Kematian Balita). 8. Kelas ibu hamil dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) 9. Pendampingan pemeriksaan ibu hamil oleh dokter SPOG dalam rangka penurunan AKI AKB 10. Pendampingan AMP (Audit Maternal Perinatal) dalam rangka penurunan AKI AKB

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” (AHH) pada tahun 2024 didukung dari anggaran beberapa sub kegiatan antara lain kegiatan SPM; Pengelolaan layanan Gizi

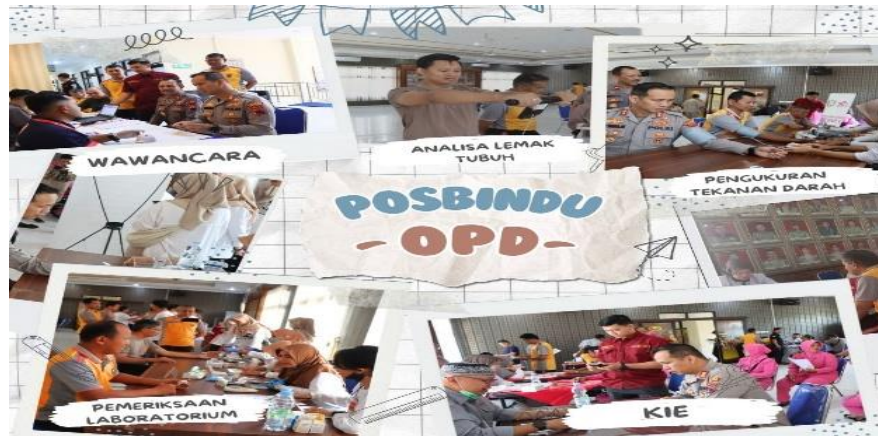
Masyarakat; Pengelolaan layanan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan layanan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp.22.778.537.200,- dengan realisasi Rp. 19.768.048.680 (96,29%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.010.488.520,- atau 3,71%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 3,71 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,29%).



Gambar 3.9
Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Gambar 3.10
Pelaksanaan Saka Bhakti Husada (SBH)



Gambar 3.11
Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan *skrining* kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung



Gambar 3.12
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan masalah gizi untuk penurunan stunting di Kab. Temanggung

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran 5

SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	100	95,75	96,19	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).

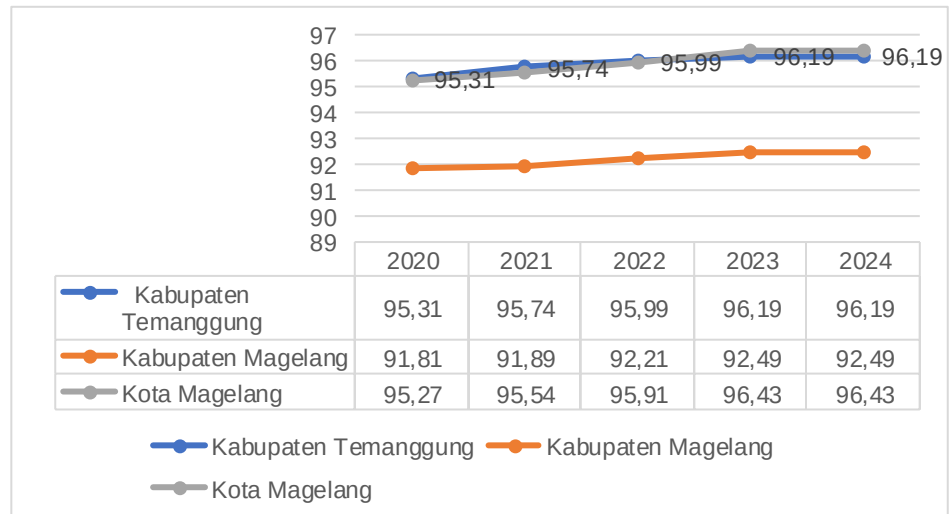
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan kesenjangan capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki. Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari Usia Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata - rata Lama Sekolah (Tahun) dan Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) berdasarkan pilah gender. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat setiap tahunnya yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Semakin angka IPG mendekati nilai 100 maka semakin setara pembangunan manusia antara Perempuan dan Laki-laki di daerah tersebut dan sebaliknya semakin angka IPG menjauhi nilai 100 maka semakin timpang pembangunan manusia antara Perempuan dan Laki-laki di daerah tersebut.

Target IPG Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan di dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebesar 95,75 dengan realisasi sebesar 96,19 (angka Tahun 2023) karena angka IPG Tahun 2024 belum rilis oleh BPS. Dengan menggunakan angka tahun 2023, tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100% atau kategori “**Sangat Tinggi**”.

Apabila dilihat dari perkembangan IPG Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,009. Dibandingkan dengan wilayah sekitar/Kawasan Gelayang (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung), posisi IPG Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berada di bawah Kota Magelang dengan selisih sebesar 0,24 dan berada di atas Kabupaten Magelang dengan selisih sebesar 3,7. Hal ini menunjukkan kinerja capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki semakin membaik dan kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Magelang dan relatif sedikit lebih besar dibandingkan dengan Kota Magelang.

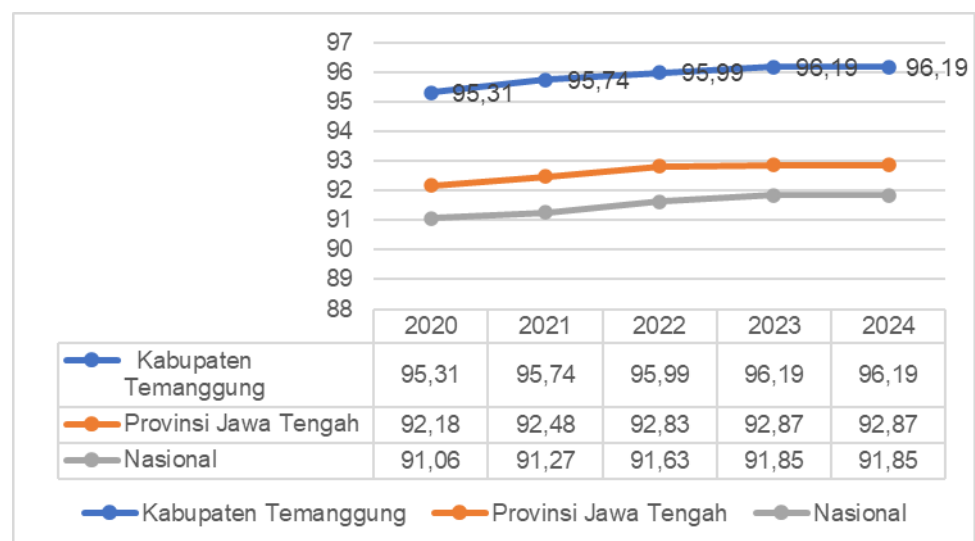
Grafik 3.11
Perkembangan IPG Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi IPG Kabupaten Temanggung berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki semakin membaik dan kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki di Kabupaten Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Grafik 3.12
Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,95	77,69
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,53	12,85
3	Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	7,57	7,46
4	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)	11.924	9.372

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada komponen Usia Harapan Hidup (Tahun) dan komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, sedangkan pada komponen Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) dan komponen Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) Laki-Laki lebih tinggi dari Perempuan.

Komponen Usia Harapan Hidup (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari biologis hingga gaya hidup.

Komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, hal ini terkait dengan angka partisipasi Perempuan pada pendidikan yang lebih tinggi dari pada Laki-laki.

Komponen Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Laki-laki lebih tinggi dari Perempuan, hal ini terkait dengan akses pendidikan pada Perempuan pada masa lalu, anggapan pendidikan bagi Perempuan hanya opsi/pilihan dan yang terpenting adalah laki-laki sebagai kepala Rumah Tangga/budaya Patriarki, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin (Persen) Perempuan 22,73% sedangkan laki-laki 24,62%.

Komponen Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) Laki-laki lebih tinggi dari Perempuan, salah satunya disebabkan gap pendapatan antara Perempuan dan laki-laki, pendapatan laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Perempuan, sumbangan pendapatan Perempuan (persen) sebesar 41,76% sedangkan Laki-laki sebesar 58,24% dan apabila dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Perempuan sebesar 65,91% sedangkan Laki-Laki 85,70%.

Dengan melihat tren capaian IPG Kabupaten Temanggung setiap tahunnya yang selalu naik mengindikasikan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menunjukkan hasil yang positif. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024, diantaranya dengan peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan melalui pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan, Advokasi organisasi Perempuan, perlindungan Perempuan, pendampingan penyusunan anggaran responsif gender di Perangkat Daerah, Gerakan Sayang Ibu (GSI), pelayanan kontrasepsi dan Kampanye “Jo Kawin Bocah”. Kaitannya dengan peningkatan pendapatan Perempuan, telah dilakukan pendampingan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asseptor).

Keberhasilan capaian IPG tersebut, didukung dengan faktor-faktor pendorong, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui faktor-faktor penghambat.

Tabel 3.27
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Gender

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
- Kesadaran Perempuan terhadap pendidikan semakin meningkat - Akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan tidak berpihak pada salah satu gender - Meningkatnya kerjasama dalam perlindungan Perempuan dan Anak	- Budaya Patriarki yang menganggap Laki-laki lebih dominan/penting daripada Perempuan - Belum meratanya akses dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam memperoleh pendapatan/pekerjaan	- Penyetaraan akses dan pemerataan layanan di bidang pendidikan - Penyetaraan akses dan pemerataan layanan di bidang kesehatan - Peningkatan pendapatan Perempuan - Peningkatan Advokasi terhadap organisasi Perempuan maupun organisasi anak

Sasaran meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan kinerja lintas sektor dan bersifat komposit, banyak faktor pembentuknya. Oleh sebab itu perlu upaya yang terus menerus, peningkatan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dan masyarakat.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp12.248.410.000,00 dengan realisasi Rp10.692.414.726 (87,30%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp6.040.920,00 atau 12,70%. Terkait dengan efisiensi sumber daya, terdapat efisiensi sebesar 12,70% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 87,30%).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 5 program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak dan 3 program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Gambar 3.13
Kegiatan Jambore Kesehatan Kader Posyandu



Gambar 3.14
Kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPC IWAPI Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029



Gambar 3.15
Kegiatan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG)

TUJUAN 2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan 2 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya perekonomian Daerah; dan
2. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah”, didukung 4 (empat) indikator, yaitu

1. Pendapatan per Kapita;
2. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
3. Angka Kemiskinan
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Srategis 6

SASARAN STRATEGIS 6 : Meningkatnya Perekonomian Daerah						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	100	32,25	33,43	100
2	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	100	18,8	19,52	100
3	Angka Kemiskinan	Angka	100	8,5	8,67	100
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	100	2,52	2,35	93,25
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran			100			98,31

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Perekonomian Daerah” tahun 2024 adalah 98,31% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, 3 (tiga) indikator tersebut bisa dikatakan tercapai dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, kecuali 1 indikator belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu TPT dengan capaian sebesar 93,25.

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran meningkatnya perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat

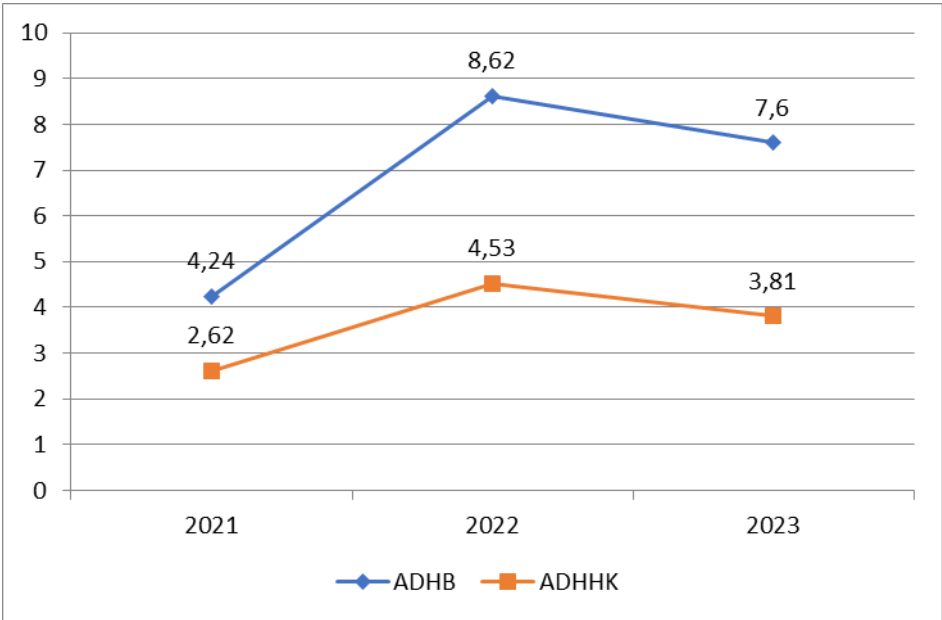
menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Data Pendapatan per kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2024 masih menggunakan data Tahun 2023 dikarenakan belum rilis oleh BPS. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	15.050.000	19.370.430	2,62
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	15.600.000	20.248.290	4,53
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.0001	21.020.000	3,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah.

Grafik 3.13
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2023



PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas

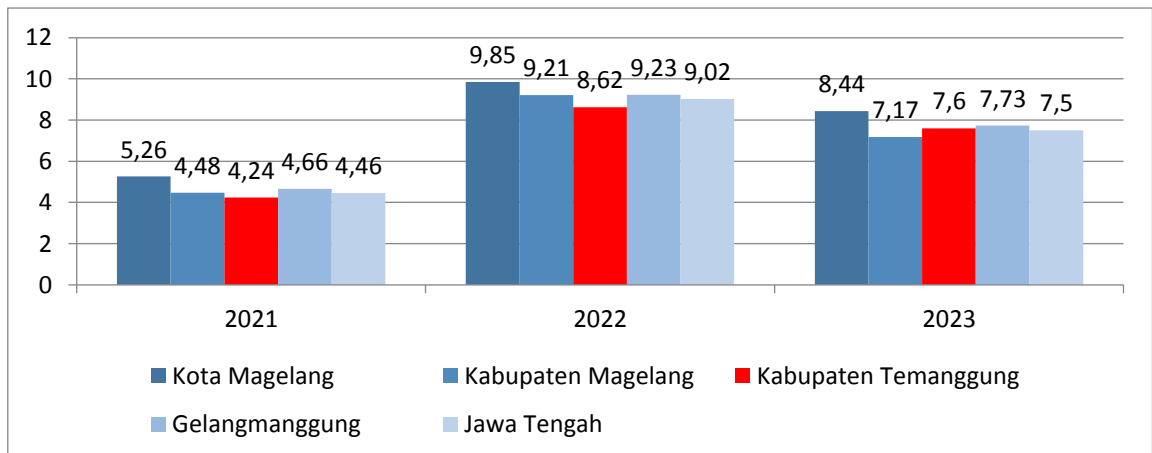
dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Pada tahun 2021-2023 setiap tahun mengalami kenaikan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Kabupaten /Kota	2021		2022		2023	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kota Magelang	75.476.930,00	5,26	82.914.310,00	9,85	89.911.880,00	8,44
Kabupaten Magelang	26.124.724,57	4,48	26.124.724,57	9,21	30.571.677,86	7,17
Kabupaten Temanggung	28.484.021,00	4,24	30.938.180,00	8,62	33.290.000,00	7,6
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	43.361.891,86	4,66	46.659.071,52	9,23	48.925.329,29	7,73
Jawa Tengah	38.568.000,00	4,46	41.946.000,00	9,02	45.199.000,00	7,5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Grafik 3.14
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten
Temanggung Tahun 2021-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah
Pengembangan Gelangmanggung

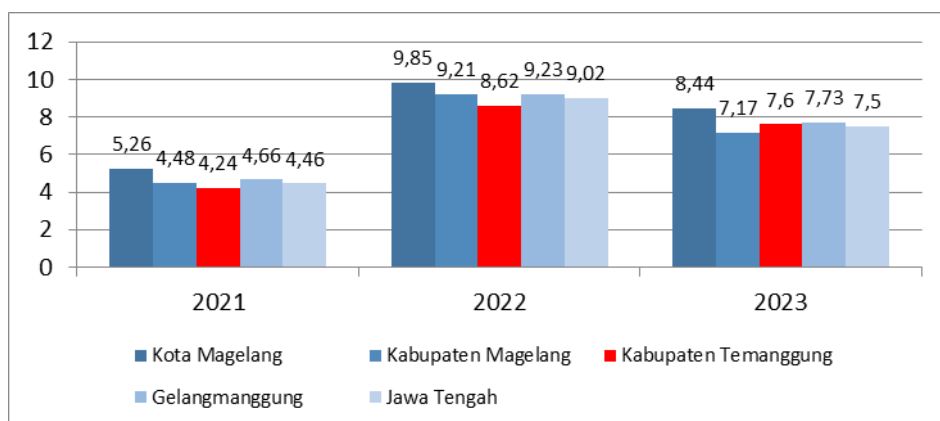


Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2021 yang merupakan pasca pandemi, pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung juga menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung dengan pertumbuhan sebesar 7,73%. Akan tetapi pada kondisi terkini, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,60%. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

Berikut adalah gambar Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2023.

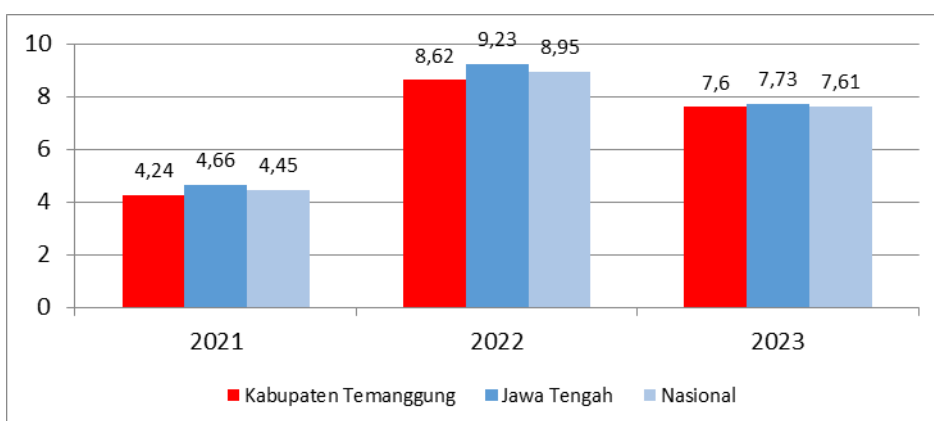
Grafik 3.15
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2021-2023 tersaji pada gambar berikut:

Grafik 3.16
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 *Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia*

Pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk

mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat. Program dan anggaran yang mendukung pada indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian;
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Program Pengembangan Ekspor;
8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
12. Program Hubungan Industrial;
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
14. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
15. Program Promosi Penanaman Modal;
16. Program Pelayanan Penanaman Modal;
17. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
20. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
21. Program Pendidikan Latihan Perkoperasian;
22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
24. Program Pengembangan UMKM;
25. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;

26. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
27. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
28. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
29. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
30. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
31. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan;

Kinerja sasaran dengan indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 didukung 32 program dengan anggaran sebesar Rp. 33.370.751.343 dan realisasi sebesar Rp. 31.607.621.292 (94,72%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,28%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,72% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,28%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator sasaran “Pendapatan per Kapita”, sebagai berikut:

Tabel 3.31
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Pendapatan per Kapita

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1	Pertumbuhan Ekonomi yang stabil	1 Tingginya tingkat pengangguran	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan per-Kapita, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2	Infrastruktur yang tersedia	2 Ketimpagan pendapatan	1 Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), mealui pajak reklame,pajak air tanah,PBB-P2,BPHTB, pajak barang jasa tertentu
3	Sumber Manusia berkualitas Daya yang	3 Pendidikan SDM masih rendah dilihat dari rata rata lama sekolah dan Angka partsipasi sekolah untuk jenjang atas masih rendah	2 Pelaksanaan elektronifikasi pajak daerah mealui Sistem Informasi Managemen (SIM) dengan menyajikan semua informasi pelaporan satu realisasi pendapatan terintegrasi dalam sistem: https://pajak.temanggungkab.go.id

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
4	Sumber Daya Alam yang melimpah	4 Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai sehingga biaya produksi masih tinggi	3. Sistem https://pajak.temanggungkab.go.id . https://pajak.temanggungkab.go.id terintegrasi dengan https://keuangan.temanggungkab.go.id/ sehingga mampu menyajikan data penerimaan pendapatan untuk laporan keuangan
		5 Produk pertanian masih dijual dalam bentuk primer (bahan mentah), hilirisasi produk masih sangat diperlukan Peran sektor primer (pertanian) dalam PDRB masih sangat dominan, padahal sektor primer sangat tergantung terhadap cuaca dll	
5	Pendidikan yang baik	5 Investasi yang tidak pasti	4. Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP) tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Temanggung
6	Tingkat pengangguran yang rendah	6 Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang meningkat	5 Melakukan perbaikan infrastruktur dasar yaitu pemeliharaan rutin jalan
			6 Pembangunan prasarana jalan
			7 Penyediaan perlengkapan jalan
			8 Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
			9 Pengembangan sarana pertanian: bantuan pupuk, bantuan bibit, pelatihan dan bantuan saprodi
			10 Pembangunan /rehabilitasi prasarana pertanian: pembangunan irigasi,JUT, embung
			11 Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan strategis
			12 Memberikan bantuan ternak
			13 Meningkatkan produksi komoditas unggulan
			14 pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana TIK dan sarana belajar mebeler anak

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
		15 Pelaksanaan promosi pariwisata
		16 Fasilitasi UMKM



Gambar 3.16
Pemantauan harga-harga

2. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

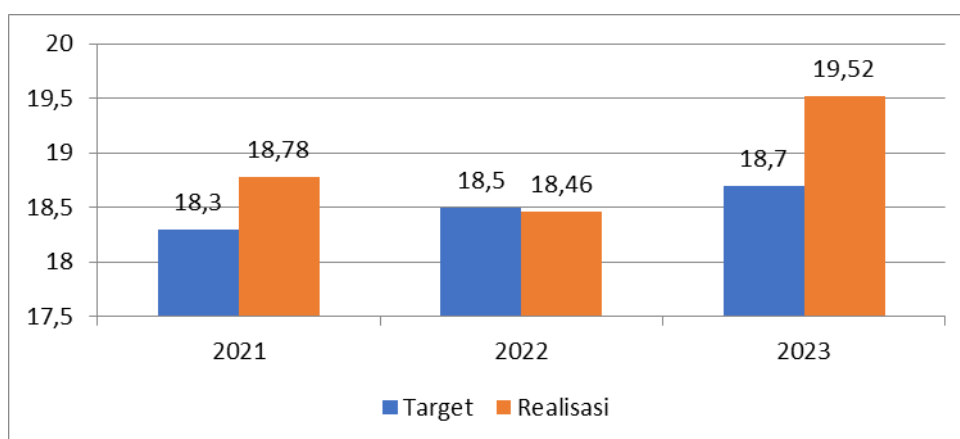
Capaian distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 masih menggunakan angka di Tahun 2023 dikarenakan angka belum rilis. Perkembangan nilai distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia, Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.32
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten
Temanggung Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06
2024	18,80	19,52 ^{*)}	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Grafik 3.17
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023



Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (low inequality). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan kondisi Tahun 2022 sebesar 18,46%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kondisi Tahun 2023 telah mencapai target.

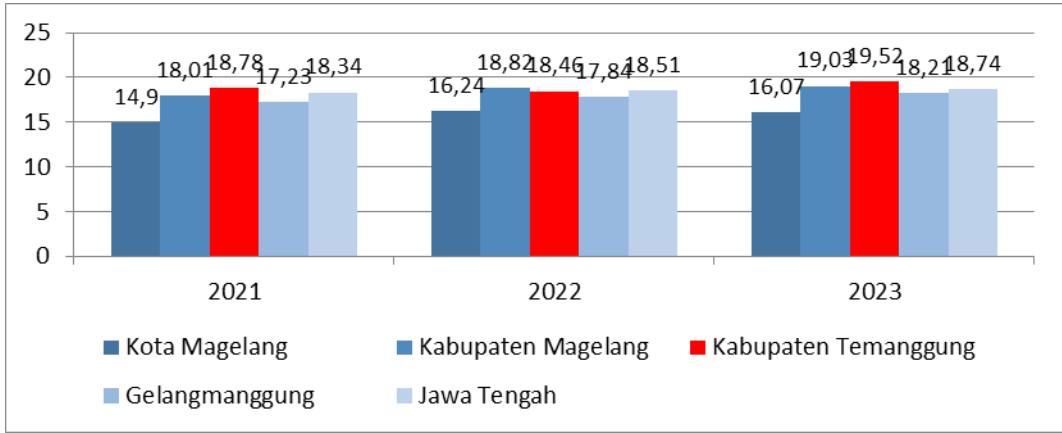
Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.33
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia			Perubahan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota Magelang	14,9	16,24	16,07	-1,36	1,34	-0,17
Kabupaten Magelang	18,01	18,82	19,03	-0,56	0,81	0,21
Kabupaten Temanggung	18,78	18,46	19,52	1,24	-0,32	1,06
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,23	17,84	18,21	-0,23	0,61	0,37
JAWA TENGAH	18,34	18,51	18,74	-0,19	0,17	0,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, data diolah

Grafik 3.18
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023



Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 capaiannya 19,52% dapat diartikan distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 1,06. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masih berada di bawah, meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini disajikan pada tabel berikut.

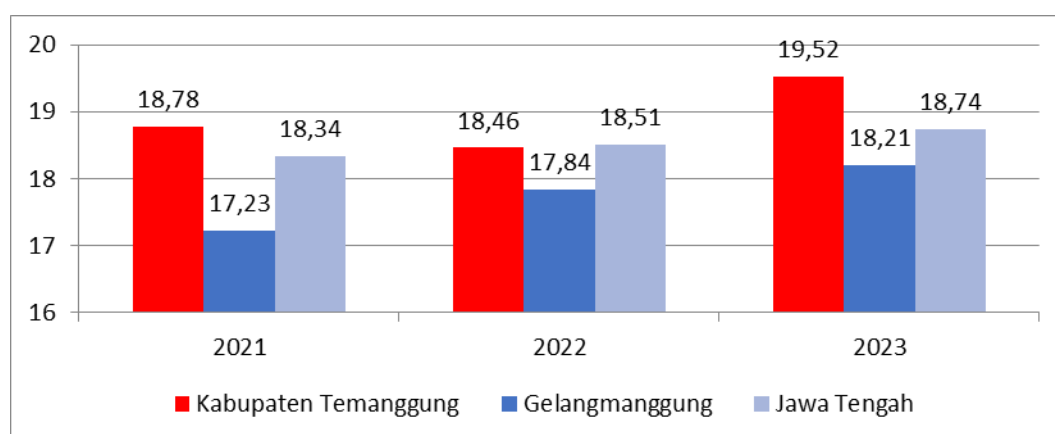
Tabel 3.34

Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23

Grafik 3.19

Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini



Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Jawa Tengah, kondisi ketimpangan menunjukkan belum adanya perbaikan pada Tahun 2021, namun mulai membaik pada Tahun 2023. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Program dan anggaran yang mendukung pada indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program penataan Desa;
5. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada tahun 2024 didukung 8 program dengan anggaran sebesar Rp. 16.384.910.000 dan realisasi sebesar Rp. 14.887.767.908 (90,86%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 9,14%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 90,86% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 9,14%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator sasaran “Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia”, sebagai berikut:

Tabel 3.35
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Pendapatan per Kapita

Faktor Pendrong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Bonus demografi yang menjadi potensi bertambahnya usia produktif	1 Inflasi yang tinggi yang dampaknya akan dirasakan masyarakat menengah kebawah sehingga kelas menengah ke bawah semakin timpang dengan kelas atas	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk meningkatkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria bank dunia, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2 Menurunnya tingkat kemiskinan	2 Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dan hanya bekerja sebagai pekerja keluarga	1 Terlaksananya pengendalian inflasi dengan: - meningkatkan produksi lokal; - pemantauan harga komoditas - pelatihan/pendampingan UMKM
3 Kegiatan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang meningkat	3 Masih rendahnya pendidikan, utamanya bagi penduduk menengah kebawah sehingga penduduk di kelas menengah kebawah masih memiliki keterbatasan baik dari sisi permodalan maupun keterampilan untuk membuka usaha	2 Penurunan tingkat pengangguran: - memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi IKM/UMKM - bekerjasama dengan sektor swasta dalam membuka peluang lapangan kerja - fasilitasi kewirausahaan
	4 Ketersediaan fasilitas pendidikan menengah masih belum merata sehingga akses pendidikan menengah bagi penduduk di pedesaan masih terbatas.	3 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan: - memberikan bantuan langsung berupa uang tunai melalui program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dan sarana belajar mebeler anak
4 Menurunnya tingkat pengangguran	5 Derajat kesehatan yang rendah utamanya pada kelas menengah ke bawah. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi kelompok ini sangat membantu dalam peningkatan produktifitas sehingga pendapatan penduduk di kelas ini semakin baik.	4 Peningkatan mobilitas sosial: - pemberdayaan mayarakat - meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan - pembangunan fasilitas social

	6 Pembangunan yang belum merata antar wilayah, antar pedesaan dan perkotaan.	5 Kemitraan dengan sektor swasta
	7 Sarana transportasi umum belum tersedia hingga pelosok pedesaan sehingga mengurangi mobilitas masyarakat pedesaan dalam beraktifitas ekonomi.	
	8 Minimnya mobilitas sosial	



Gambar 3.17
Operasi Pasar

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini

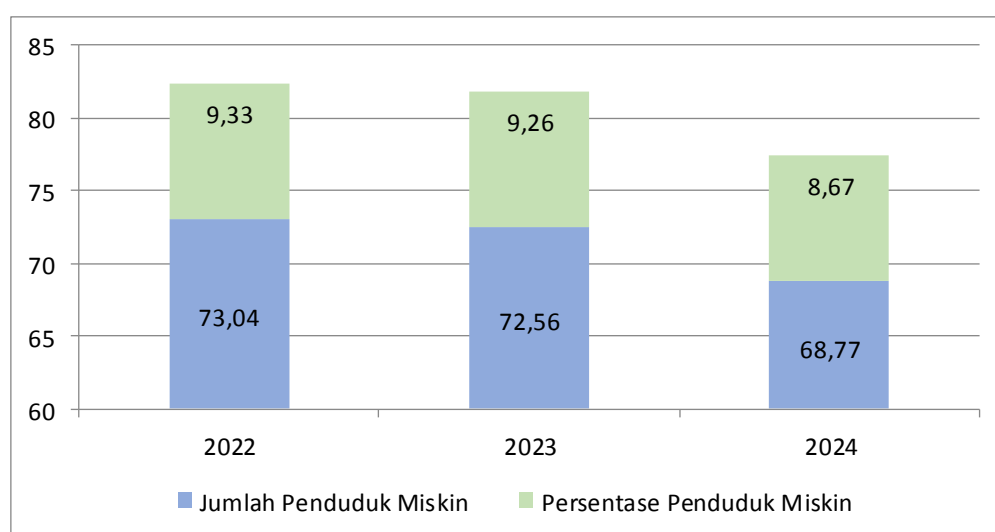
Tabel 3.36
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk miskin	73.040	72.560	68.770

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
2.	Jumlah penduduk	800.267	808.446	814.879
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,33	9,26	8,67

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Grafik 3.20
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

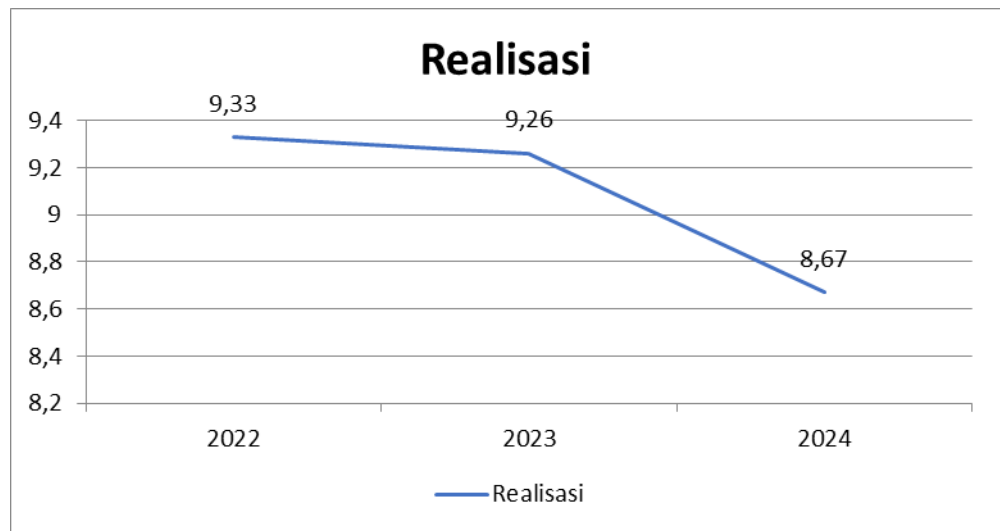


Perbandingan capaian “Angka Kemiskinan” Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Kemiskinan	%	9,33	100
2023	Angka Kemiskinan	%	9,26	100
2024	Angka Kemiskinan	%	8,67	100

Grafik 3.21
Capaian angka kemiskinan Tahun 2022 - 2024



Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi capaian terjadi penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebanyak 66.770 orang menurun 4.190 orang dibanding pada tahun 2023. capaian kinerja tahun 2024 tercapai 100% dalam kategori Sangat Tinggi.

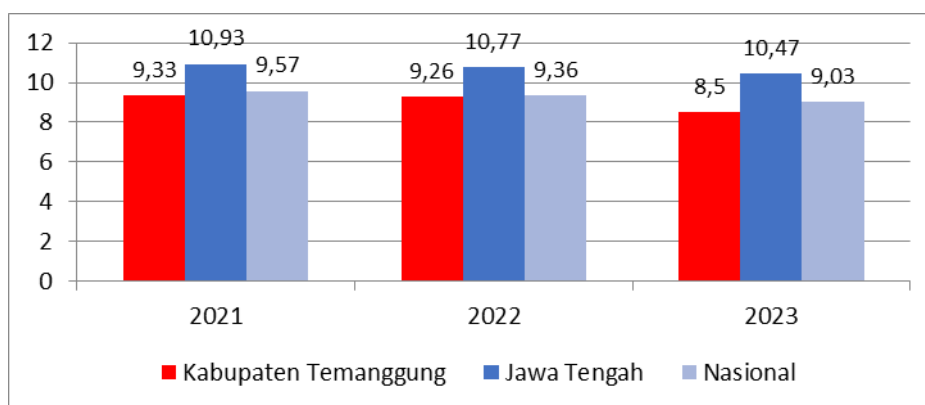
Perbandingan target dan realisasi angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2022	10	9,33	10,93	9,57
2023	9,8	9,26	10,77	9,36
2024	8,5	8,67	10,47	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Grafik 3.22
Perbandingan Angka Kemiskinan Tahun 2022 - 2024



Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 lebih baik dibandingkan Provinsi juga capaian Nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

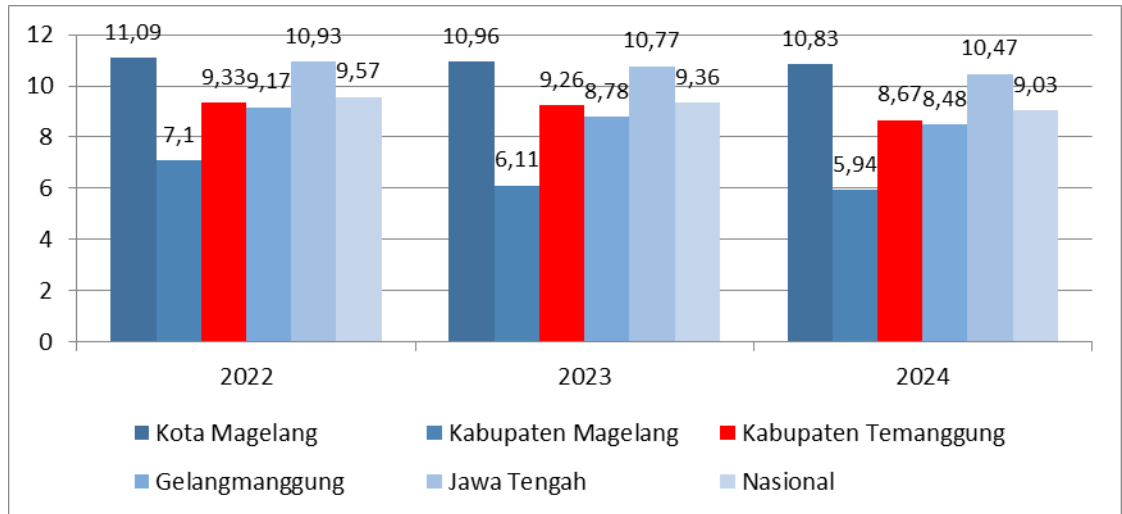
Sedangkan posisi relatif dan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat pada konstelasi Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin			Perubahan (%) Penduduk Miskin		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	11,09	10,96	10,83	-0,82	-0,13	-0,13
Kota Magelang	7,1	6,11	5,94	-0,65	-0,99	-0,17
Kabupaten Temanggung	9,33	9,26	8,67	-0,84	-0,07	-0,59
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,17	8,78	8,48	-0,77	-0,4	-0,29
JAWA TENGAH	10,93	10,77	10,47	-0,86	-0,16	-0,46
NASIONAL	9,57	9,36	9,03	-0,14	-0,21	-0,54

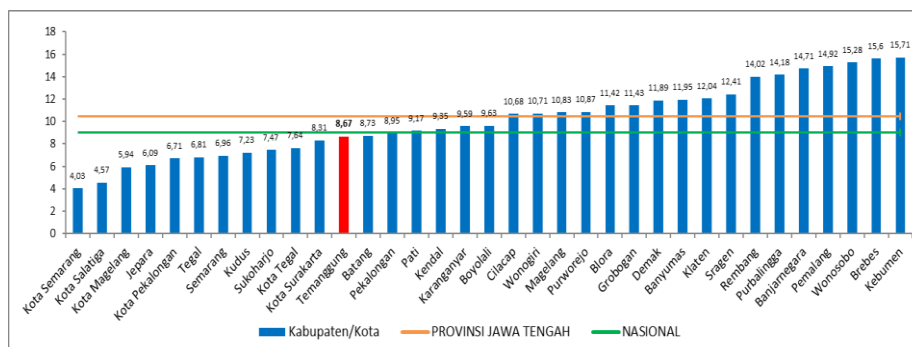
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Grafik 3.23
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023



Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari Kabupaten Magelang. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke 12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat terlihat pada gambar berikut:

Grafik. 3.24
Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Program dan anggaran yang mendukung pada indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program perlindungan dan jaminan sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2024 didukung 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 25.499.129.115 dengan realisasi sebesar Rp. 25.063.710.402,00 (98,3%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,7%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,29% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 1,71%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator “Angka Kemiskinan”, sebagai berikut:

Tabel 3.40
Faktor pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
Pada Indikator Angka Kemiskinan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Peningkatan pendapatan masyarakat	1 Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan produktifitas saing rendah	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk mengurangi kemiskinan, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2 Penurunan beban pengeluaran	2 Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih	1 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat; - pemberian modal kerja bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP); - pelatihan kerja dan penempatan kerja

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
3 Pengurangan kantong-kantong kemiskinan	3 Kurangnya akses layanan kesehatan terhadap	2 Penurunan Beban Pengeluaran; - pemberian sembako dan bantuan kepada kelompok berkebutuhan khusus lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS); - pemberian premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) - pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Fasilitas Jamban dan sanitasi lingkungan - pemasangan listrik
4 Indeks keparahan kemiskinan menurun	4 Distribusi pendapatan yang belum cenderung merata	
5 Indeks keparahan kemiskinan menurun	5 masih banyak penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan yang hampir miskin/ atau rentan miskin	
	6 Cuaca ekstrim, gagal panen, wabah penyakit akan menurunkan pendapatan penduduk miskin yang umumnya berada disektor pertanian	
7 Peningkatan akses pendidikan	7 Kurangnya lapangan kerja	3 Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan: - pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dan sarana belajar meubelair anak
8 Peningkatan akses layanan kesehatan	8 Kurangnya jaminan sosial	
9 Perbaikan infrastruktur	9 Kurangnya pekerjaan berkecakupan tinggi	
10 Program perlindungan sosial		
11 Pemberdayaan masyarakat		



Gambar 3.18
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Data TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 3,5%, naik 0,03% dari tahun 2023 dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja, yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran Terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal : TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.

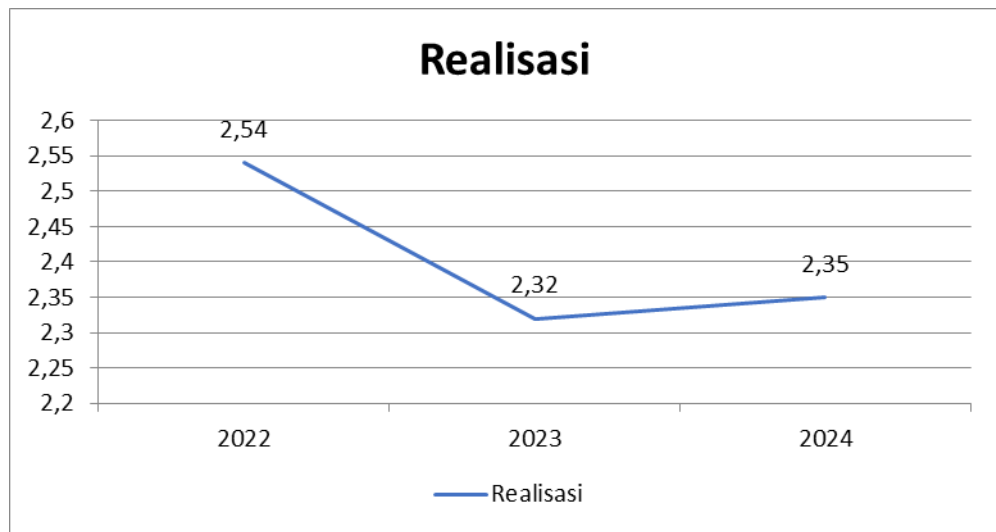
Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,54	100
2023	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,32	100
2024	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	100

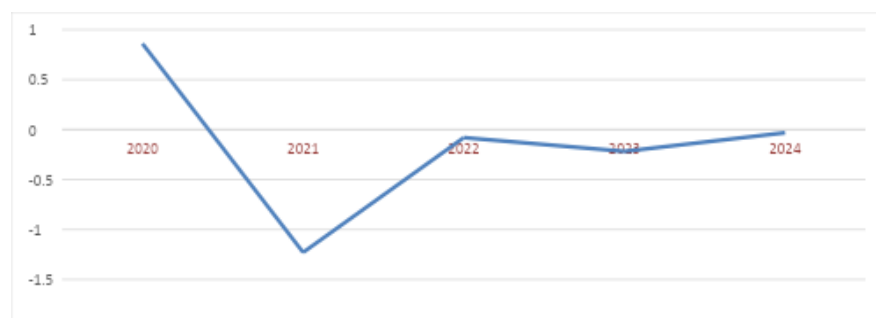
Sumber: www.bps.go.id

Grafik 3.25
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian
Tahun Sebelumnya



Pada tahun 2022 hingga selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana grafik dan tabel berikut:

Grafik 3.26
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024



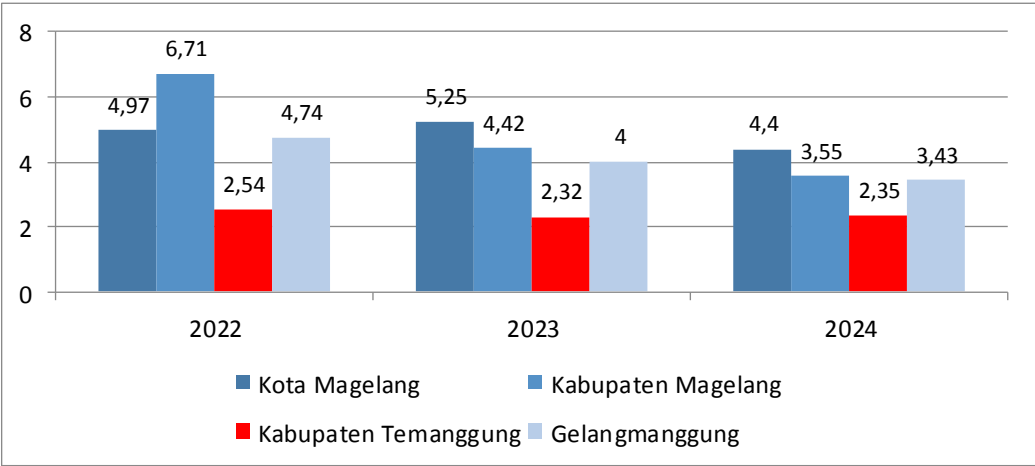
Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPA) Kabupaten Temanggung tergolong rendah jika dibandingkan TPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu dengan capaian 2,32%. Pada tahun 2024 TPA pada tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023. TPA Kabupaten Temanggung

pada tahun 2024 sebesar 2,35% mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari tahun 2023. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mendapatkan Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah atas capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terendah peringkat II Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2023. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	TPT		
	2022	2023	2024
Kota Magelang	4,97	5,25	4,4
Kabupaten Magelang	6,71	4,42	3,55
Kabupaten Temanggung	2,54	2,32	2,35
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	4,74	4	3,43

Grafik 3.27
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024



Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada

Tahun 2024. TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%.

Program yang mendukung pada indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 didukung 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 987.461.531 (94.95%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,05%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,25% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94.94% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 1,69%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, sebagai berikut

Tabel 3.43
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Tingkat Pengangguran terbuka

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja
1	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja	1	Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang tidak diiringi dengan kualitas yang baik	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja	
2	Mendorong investasi	2	Pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan usaha mengalami kontraksi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun bahkan menimbulkan PHK	1	Meningkatkan layanan "Siparjono" dengan target layanan Work Preparation Program bagi pencari kerja, yaitu rekrutmen dan penyediaan lowongan kerja.
3	Mendorong Kewirausahaan	3	Keterbatasan Keterampilan bagi generasi muda sehingga tidak mudah membuka lapangan usaha secara mandiri	2	Melaksanakan program perencanaan karier bagi siswa SMP dalam upaya pencegahan pengangguran akibat ketidaksesuaian jurusan sekolah yang diambil minat bakat dan kondisi pasar kerja
4	Membangun infrastruktur teknologi	4	Kesenjangan Pendidikan	3	Melaksanakan pendampingan wirausaha pada peserta pasca pelatihan perluasan kesempatan kerja
5	Membangun sistem padat karya	5	Inflasi yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga berpotensi pengurangan jumlah karyawan	4	Melanjutkan pendataan TPT pada tingkat desa/kelurahan
6	Membuka kesempatan kerja ke luar Negeri	6	Kemajuan teknologi mendorong sektor padat karya mengurangi jumlah tenaga kerja, disisi lain tenaga kerja yang ada belum memenuhi kualifikasi pekerjaan lain yang tersedia	5	Terlaksananya kegiatan job fair
				6	Terlaksananya penyuluhan ketenagakerjaan
				7	Pelatihan teknis bagi peserta magang jepang
				8	Terlaksananya pelatihan pengelolaan cerutu bagi pelaku industri Kecil dan Menengah
				9	Terlaksananya pembinaan pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja	
					Kejuruan (BKK SMK)



Gambar 3.19
Pelatihan Youtube

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, sebagaimana tabel dibawah ini.

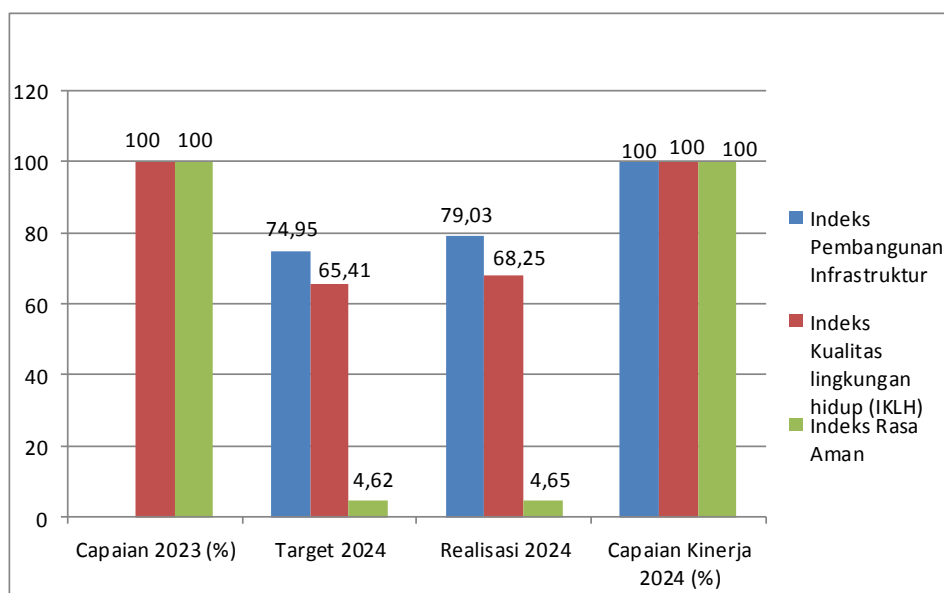
Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	angka	n.a	74,95	79,03	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	100	63,47	68,25	100

SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Indeks Rasa Aman	angka	100	4,62	4,65	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sasaran strategis meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “**sangat tinggi**”.

Grafik 3.28
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas



Sumber: Capaian IKPD Triwulan IV Tahun 2024, BAPPEDA Kabupaten Temanggung

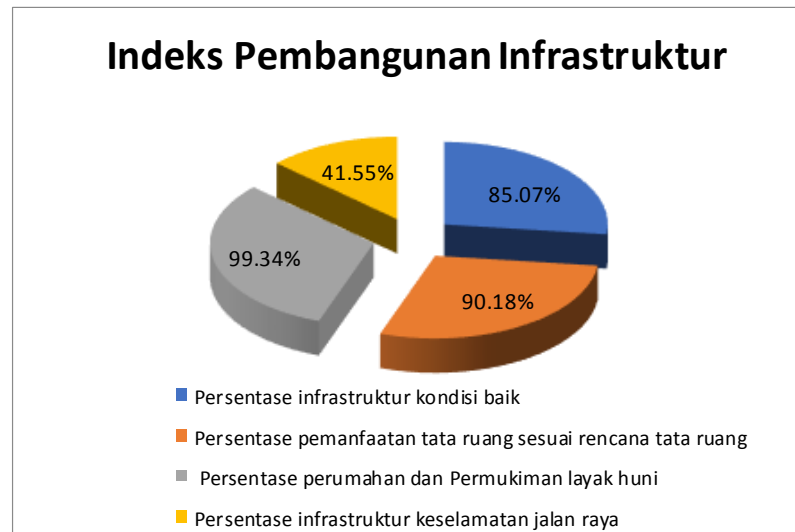
Adapun analisis capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks pembangunan infrastruktur adalah komponen dari indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja suatu wilayah berdasarkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Indeks pemerintah daerah merupakan teknik dan praktek konstruksi untuk merencanakan, mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur utama untuk kota/kabupaten tersebut dan masyarakatnya. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Temanggung tercapai 100% dari target 74,95 terealisasi 79,03 dengan skala penilaian **“sangat tinggi”**. Formula perhitungan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dihitung dengan menjumlahkan variabel-variabel indikator sarana prasarana wilayah yang terdiri dari persentase infrastruktur kondisi baik, persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, persentase perumahan dan permukiman layak huni, persentase infrastruktur keselamatan jalan raya, kemudian dibagi 4 (empat). Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan rincian:

- a.) Indikator persentase infrastruktur kondisi baik dan persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang merupakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran DPUPR Kabupaten Temanggung;
- b.) Indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan indikator kinerja sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung; dan
- c.) Indikator persentase infrastruktur keselamatan jalan raya merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Grafik 3.29
Indeks Pembangunan Infrastruktur
 Komponen pembentuk indikator Persentase infrastruktur wilayah



kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah berakses air minum layak. Untuk mengukur persentase infrastruktur wilayah kondisi baik digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.



Sumber : DINKOMINFO Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 3.20
Pembangunan Tanggul

Program pendukung pada indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Penyelenggaraan Jalan;
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Pengembangan Perumahan;
7. Program Kawasan Permukiman;
8. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Kinerja indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2024 didukung 7 program dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.184.812,00 dan realisasi sebesar Rp. 78.055.700.108,00 (97,30%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,7%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97.30% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,7%.

Tabel 3.45
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Indeks pembangunan Infrastruktur

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), antara Pemda, masyarakat calon penerima manfaat, kementerian/lembaga/ instansi terkait, dan lembaga donor sehingga berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial, dapat diminimalkan; Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan 2 Adanya dukungan anggaran dari APBD, APBN APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber lainnya	1 Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya; 2 Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN bidang teknis) untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data; 3 Bencana alam dan banjir; 4 Alih fungsi lahan pertanian;	1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan; 2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan 3. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung. 4. Pengendalian alih fungsi lahan;

2. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)

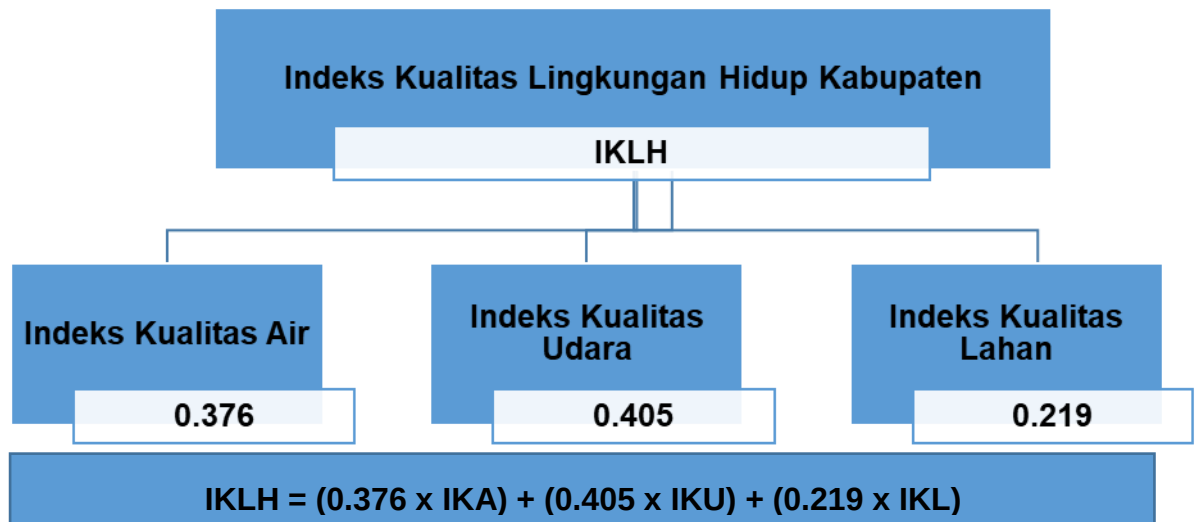
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Sumber : DINKOMINFO Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.21
Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Tabel 3.46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Predikat	Range nilai
Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.47
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IKLH	69,65	65,61	69,51	69,86	74,83	68,25
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	46,81
Perhitungan Rumus Lama		Perhitungan Rumus Baru					
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)					

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nilai IKLH Tahun 2024 juga dipengaruhi oleh adanya data Indeks Kualitas Lahan yang diwajibkan menggunakan hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan metode penginderaan citra satelit sehingga berbeda hasilnya dibanding tahun sebelumnya. Upaya dalam mencapai target kinerja antara lain

dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi IKLH Kabupaten Temanggung dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Standar Nasional Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi IKLH Tahun 2024		
		Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53	69,70	68,25
	Indeks Kualitas Udara	90,13	88,03	87,84
	Indeks Kualitas Air	54,78	52,01	59,63
	Indeks Kualitas Lahan	61,95	49,26	48,61
	Indeks Kualitas Air Laut	81,67	78,67	-

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih rendah 1,45 apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan IKLH Nasional lebih rendah 5,28. Selisih tersebut disebabkan oleh indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan masih dibawah realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun Kabupaten Temanggung masih unggul dalam pencapaian indeks kualitas air dengan target 52,70 dan realisasi 59,63. Karena telah memenuhi target yang ditetapkan, capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tercapai 100% dengan skala penilaian “**sangat tinggi**”.

Tabel 3.49
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendrong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1. Adanya dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara; 2. Pemulihan kerusakan lahan di Kabupaten Temanggung	1. Dari hasil pengujian terdapat kualitas air sungai yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan di beberapa titik pemantauan dan Kualitas udara yang masih perlu ditingkatkan Hasil pengujian kualitas lingkungan tidak bisa langsung diketahui, dibutuhkan waktu dalam pengujian dan analisa di Laboratorium Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan	1. Melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan 2. Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD



Sumber: DINKOMINFO Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.22
Penanaman Pohon

Program pendukung pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 didukung 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 11.252.693.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.545.594.479,00 (84,82%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 15,18%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 84,82% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 15,18%.

3. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain:

- 1) Keamanan dari Bencana;
- 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan
- 4) Keamanan dari Kekerasan.



Sumber: DINKOMINFO Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 3.23
Gelar Pasukan pada Apel Siaga Persiapan Natal dan Tahun Baru

Capaian Indeks rasa aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja	Skala Nilai
2020	0,64	4,36	100%	Sangat Tinggi
2021	4,42	4,48	100%	Sangat Tinggi
2022	4,43	4,55	100%	Sangat Tinggi
2023	4,44	4,55	100%	Sangat Tinggi
2024	4,62	4,65	100%	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Realisasi Indeks Rasa Aman Tahun 2024 yaitu 4,65 dari target 4,62 sehingga capaian kinerja 100% dengan skala penilaian “**sangat tinggi**”, realisasi Indeks Rasa Aman meningkat 0,10 dari realisasi tahun 2023 dan nilainya meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : DINKOMINFO Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 3.24
Upacara Gelar Pasukan pada Pemilihan Bupati/WakilBupati

Tabel 3.51
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Indeks Rasa Aman

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja
1	Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi	1	Masih terdapat 2 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Keamanan Bencana serta Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait;
2	Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian;	2	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah	2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya;

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja
3	Media sosial membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat.	3	Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko yang tidak terlihat daripada risiko yang terlihat misalnya risiko dari kecanggihan teknologi.	3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas; 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran; 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek.

Indikator Indeks Rasa Aman didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penanggulangan Bencana;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kinerja indikator Indeks Rasa Aman pada tahun 2024 didukung 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 6.100.641.003,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.978.088.455,00 (97,99%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,01%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,99% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,01%.

TUJUAN 3

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Tujuan 3 didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.;
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur; dan
3. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	85,64	65,5	73,66	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Tujuan

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional;
4. Meningkatkan peran Aparat Pengawas (internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penyerapan anggaran ;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.

Sedangkan pencapaian sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan bebas KKN Tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Keterbukaan Informasi Publik

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	69,52	87,56%
2023			68,08	85,64%
2024			73,66	100%

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id> 2024

Realisasi kinerja IKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 73,66 dan Capaian kinerja nilai 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, hal ini disebabkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, adanya transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2024

Dimensi yang dinilai	Hasil pengukuran
Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,67
Dimensi 2 : Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15,00
Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,64
Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran	15,00
Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah	3,24
Dimensi 6 : Opini BPK	15,00
Jumlah	73,66

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan upaya pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas

Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja IPKD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian target Kinerja
Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/	- Perencanaan penganggaran dari RMPJD sampai pada APBD sudah tidak sesuai jadwal (dimensi 1) sehingga mempengaruhi nilai pada dimensi 3 yaitu ketepatan waktu - Perhitungan yang dilakukan oleh provinsi sehingga Kabupaten perlu menunggu - Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja PD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua PD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh PD di Kabupaten Temanggung. - IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.	Penyusunan perencanaan dari RMPJD sampai pada APBD berkesinambungan dan tepat waktu. Pada saat pengisian aplikasi harus duduk bersama antara Bappeda, BPKPAD dan kominfo selaku PPID sehingga ada kesesuaian data. Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi

Sasaran ini didukung oleh 8 (delapan) Program Antara lain

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program penelitian dan pengembangan;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Anggaran program-program pada sasaran ini dari total anggaran sejumlah Rp 415.735.292.025,00 terealisasi sejumlah Rp 412.974.216.990,00 atau terealisasi 99,33%. Dari data realisasi anggaran yang sejumlah 99,33% bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator/sasaran ini 100%, maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,67%.



Gambar 3.25
Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2024

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya Pengelolaan SDM						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Merit System	Angka	100	0,5	0,62	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100

Sumber : Perangkat Daerah, data diolah Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur” didukung dengan 1 indikator sasaran yaitu Indeks Merit System pada Tahun 2024 terealisasi 0,62, melebihi 0,12 dari dari target Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan (0,5). Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi sipinter yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Kategori, sebutan dan rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO	NILAI	INDEKS	KATEGORI / SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan

NO	NILAI	INDEKS	KATEGORI / SEBUTAN	REKOMENDASI
				kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit

Secara rinci hasil perolehan atau skor indeks Sistem Merit tahun 2023 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.58
Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;	2,5	10	10
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	7,5
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	10
	SUB-TOTAL I				40	37,5
II	PENGADAAN (10%)	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	8
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	8
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara objektif dan transparan;	2	8	8
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;	2	8	8
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB-TOTAL II				40	40

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOB OT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
III	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	10
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	20	10
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	2,5
		6 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	7,5	7,5
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		rangka peningkatan kapasitas ASN;				
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2,5	5
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5	7,5	5
	SUB-TOTAL III				80	45
IV	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1 Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2,5	10	7,5
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan	2,5	10	7,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOB OT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		dan kompetitif;	pelanggaran sistem merit;			
	SUB-TOTAL IV				40	30
V.	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	20
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	10	5
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5	5	5
	SUB-TOTAL V				60	50

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
VI	PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	10	10
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan nonfinansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	10	2,5
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	10	7,5
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	2,5	7,5	7,5
	SUB-TOTAL VI				37,5	27,5
VII	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	8	4

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		diselenggarakan secara nasional);				
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktivitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	8
	SUB-TOTAL VII				16	12
VIII	SISTEM INFORMASI (6%)	1 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6
		2 Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	4	3
		3 Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan e-office;	1	4	3
		4 Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
	SUB-TOTAL VIII				20	16
	TOTAL				333,5	258
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024, merupakan hasil penilaian yang sudah ditetapkan oleh KASN pada Tahun 2023 yaitu sebesar 258 dengan nilai indeks 0,62, kategori Baik. Hasil tersebut melebihi target capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 0,50. Penggunaan hasil tahun 2023 dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada penghitungan sistem merit seiring dengan dibubarkannya kelembagaan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemetaan penilaian penerapan *sistem merit* dalam Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.59
Persandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Merit System	Angka	0,48	94,12%
2023			0,62	100%
2024			0,62*	100%

*Angka tahun sebelumnya

Pada tabel diatas dapat diketahui Indeks merit sytem Kabupaten Temanggung semakin meningkat dari Tahun 2022 realisasi sebesar 0,48 sampai dengan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 0,62 dan capaian kinerja pada Tahun 2024 tercapai 100% dengan skala penilaian kinerja "**Sangat Tinggi**".

Angka Tahun 2024 ini masih menggunakan angka hasil tahun 2023,karena dengan pembubaran kelembagaan Komite Aparatur Sipil

Negara (KASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah tidak terdapat lagi pengaturan tentang kelembagaan KASN. Selanjutnya untuk terkait dengan Indeks Sistem Merit ini masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hasil indeks sistem merit Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memperoleh 0,62. angka ini lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,81. Total nilai kabupaten Temanggung pada nilai-nilai aspek pembentuk Indeks Sistem merit adalah sebesar 258, hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Magelang yang sebesar 337,5 dan juga lebih rendah dari Kabupaten Magelang sebesar 293.

Tabel 3.60
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian target Kinerja
Melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit, menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan: 1. Aspek Perencanaan Kebutuhan : Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan; Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan 2. Aspek Pengadaan: KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN; Laporan evaluasi latsar 3. Aspek Pengembangan Karir: Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen; Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi; Laporan diklat pegawai terbaru; KAK coaching, mentoring dan magang; Dokumentasi coaching mentoring 4. Aspek Promosi dan Mutasi: Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka 5. Aspek Manajemen Kinerja:Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai; Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai 6. Aspek Penggajian,	1. Belum memiliki rencana suksesi by system untuk seluruh pegawai 2. Belum menyusun kesenjangan (gap) kinerja. 3. Penilaian sistem merit masih diprioritaskan untuk instansi yang belum mendapatkan nilai dengan kategori baik, sehingga pada saat ini belum dapat menilaikan sistem merit	1. Menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen 2. Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin. 3. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku (PKSP) 360° untuk aspek manajemen kinerja.

Penghargaan, dan Disiplin: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan 7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum 8. Aspek Sistem Informasi: Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta; Dokumen integrasi SIMPEG; serta tersedianya dan telah dilakukannya pengembangan aplikasi yang mendukung sistem merit, yaitu aplikasi e-kinerja BKN dan aplikasi PKSP 360 derajat		
---	--	--

Sasaran dan inidikator ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Anggaran penunjang Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Tahun 2024 sebesar Rp1.867.719.500,00, terealisasi sebesar Rp1.025.839.965,00 atau 66,48%. Penyerapan anggaran yang hanya 66,48% dikarenakan anggaran yang rencananya untuk kegiatan assesment pegawai dapat dilakukan dengan pola kerja sama dengan Badan kepegawaian Negara (BKN) secara gratis. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.841.879.535,00 atau 33,52%. Terkait efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% terdapat efisiensi sumber daya sebesar 33,52%.



Gambar 3.26
Dokumentasi Kegiatan
Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS 10: Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/ nilai	65,17	B>60-70	66,36	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/ nilai	84,97	B/76,61 – 88,30	86,91	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100

Sumber Data: Perangkat Daerah, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani” pada tahun 2024 hasil penilaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah 66,36 dari target RPD sebesar B/>60-70. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % “Sangat Tinggi”.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani” pada tahun 2024 hasil penilaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 86,91 dari target RPD sebesar B/76,61 – 88,30. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	64,73	64,73
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	83,41	100
2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	65,17	65,17
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	84,97	100
2024	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	66,36	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	86,91	100

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) terdapat kenaikan capaian kinerja karena adanya perubahan target pada RPD 2024-2026.

1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dengan capaian nilai kategori B dari target nilai kategori B sehingga indikator dimaksud tercapai dari target RPD 2024. Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024, hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Realisasi Kinerja Dari Tahun 2022-2024

Tabel 3.63

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/ nilai	60,16	62,11	63,84	64,73	65,17	66,36
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/ nilai	79,95	80,41	82,06	83,41	84,97	86,91

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) secara nilai tiap tahun mengalami peningkatan meskipun masih dengan predikat B. Peningkatan tersebut karena adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dengan hasil 86,91 (BAIK) pada tahun 2024. Nilai tersebut karena adanya perbaikan dalam penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan, mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Magelang.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Magelang, sebagai berikut:

Tabel 3.64
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Kabupaten Temanggung dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten dan Kota Magelang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024		
				Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	Meningkatkannya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	66,36	82,63	64,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91 (B)	88 (A)	88,43 (A)
				Kab. Temanggung	Kota Magelang	Kab. Magelang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	66,36	75,02	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91	86,11	86,99

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif,

bersih dan melayani dengan standar Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 (satu) indikator yang berpredikat sama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Capaian AKIP Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibanding capaian rata-rata Kabupaten/kota Nasional yang sebesar 64,23 tetapi lebih rendah dibanding Capaian AKIP Provinsi Jawa Tengah yaitu 82,63 (A). Sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja IKM Kabupaten Temanggung lebih rendah dibanding dengan keduanya.

Untuk Capaian AKIP jika dibandingkan dengan Kota dan Kabupaten Magelang, maka Kabupaten Temanggung lebih rendah dari keduanya Kota Magelang memperoleh 75,02 (BB) dan Kabupaten Magelang memperoleh 71,00 (BB), sedangkan hasil IKM capaian Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari Kota Magelang (86,11) tetapi lebih rendah dari Kabupaten Magelang (86,99).

Dalam perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti Rekomendasi atas Laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya antara lain:

Tabel 3.65
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Waktu
Perencanaan Kinerja			
1	Memastikan kembali penyusunan penjenjangan kinerja/cascading disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penjenjangan kinerja seharusnya disusun berdasarkan pohon kinerja yang menjabarkan kerangka logis/logical framework serta mengutamakan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) yang logis dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama (<i>ultimate outcome</i>). Selain logis secara penjabaran kinerja, penjenjangan kinerja juga seharusnya dapat membagi kinerja pada level strategis yang sesuai;	Penyusunan tahapan penjenjangan kinerja berdasarkan pohon kinerja sudah dilakukan untuk penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Termasuk mengundang Narasumber dari Kementerian PAN dan RB	1 November 2024-26 November 2024
2	Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD dengan merumuskan	Mekanisme perbaikan kualitas dokumen perencanaan akan dilaksanakan pada saat	November 2024 - Juli 2025

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Waktu
	tujuan/sasaran strategis yang berorientasi hasil atau mengarah pada perbaikan berdasarkan isu-isu strategis daerah serta sesuai dengan level kinerjanya;	penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	
3	Melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan kinerja agar searah dan terukur;	Penyelarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan perencanaan Tingkat Provinsi dan Nasional sudah dilakukan pada saat penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyelarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan PD sudah dilaksanakan pada saat penyusunan Renstra dan Renja PD.	November 2024 - Juli 2025
4	Menetapkan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai dengan memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) dan cukup;	Mekanisme perbaikan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai dengan memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) akan dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	1 November 2024 s.d. Juli 2025
5	Menjadikan laporan kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan target kinerja, dengan melakukan analisa yang lebih akurat pada capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan yang dilakukan;	1. melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah 2. Penyusunan buku evaluasi kinerja pembangunan	Tiap Triwulan Setiap Semester
6	Melakukan perbaikan dokumen IKU pada sebagian besar PD yang melampirkan informasi umum mengenai indikator seluruh yang digunakan, seperti definisi operasional/formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab;	Penyusunan perubahan IKU untuk semua PD	Desember 2024 – Januari 2025
Pengukuran Kinerja			
1	Mendorong upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan meningkatkan implementasi	1. monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pemanfaatan	s.d Desember 2024

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Waktu
	SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja level Pemda maupun PD atau memanfaatkan aplikasi/teknologi informasi untuk memudahkan perhitungan capaian berbasis kinerja secara berkala;	aplikasi Pena Kita 2. Pemkab Temanggung sedang membangun aplikasi untuk mengintegrasikan SAKIP, Laporan realisasi capaian Fisik dan anggaran	s.d April 2025
Pelaporan Kinerja			
1	Meningkatkan kualitas analisis capaian kinerja pada laporan kinerja di PD dengan menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang mendalam dan detail di tiap indikator, melampirkan upaya dan tindak lanjut untuk perencanaan kinerja kedepan, serta melakukan analisa komprehensif lainnya seperti analisis efisiensi sumber daya dan analisa terhadap refocusing program/kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja;	Telah melaksanakan Rapat koordinasi bersama PD dalam rangka penyusunan laporan kinerjadan telah dilakukan pendampingan terutama pada Bab analisis capaian kinerja sasaran dan program.	Januari 2025
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Menjadikan laporan kinerja sebagai sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan target kinerja, dengan melakukan analisa yang lebih akurat pada capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan yang dilakukan;	Melakukan reuiu atas penetapan target kinerja pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026 agar target yang ditetapkan pada tahun 2026 mempertimbangkan analisa capaian kinerja tahun 2024/2025 yang terdapat pada laporan kinerja. Inspektorat telah melakukan reuiu Laporan Kinerja TA 2023 pada seluruh perangkat daerah yang didalamnya termasuk reuiu atas penetapan target kinerja dan analisis capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan agar lebih akurat dan akan kembali melakukan reuiu laporan kinerja PD TA 2024. Inspektorat telah melakukan reuiu terhadap penetapan target kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun lalu pada Laporan Kinerja dengan target tahun berjalan pada kertas kerja evaluasi AKIP (LKE).	Bulan April Tahun 2025 Bulan Pebruari Tahun 2025 3. Bulan Juni - Agustus Tahun 2024
	Melakukan perbaikan sistem pelaksanaan evaluasi internal	Inspektorat telah melakukan evaluasi AKIP	Bulan Juni sd Agustus Tahun

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Waktu
	agar dilakukan pada setiap tahun berjalan dan menyeluruh pada seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Temanggung, kemudian melaporkan hasilnya kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP internal dan/atau esr.menpan.go.id ;	internal Tahun Berjalan (Tahun 2024) terhadap seluruh Unit Kerja (46 Perangkat Daerah) dan telah mengunggah LHE AKIP Internal tersebut melalui aplikasi esr.menpan.go.id	2024
	Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai bagian dari upaya monev dapat memberikan motivasi PD dalam meningkatkan implementasi SAKIP.	Inspektorat telah menyusun kebijakan <i>reward & punishment</i> dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal.	Bulan Nopember 2024

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu anggaran dan realisasi program yang terkait dengan pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani didukung oleh program:

1. Program Penunjang Urusan Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada tahun 2024 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi Rp. 201.000.452,- atau 95,71 % sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.999.548,- atau 4,29%.

Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani tercapai 100%. Terkait dengan efisiensi sumber daya maka berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran dimaksud terjadi efisiensi sumber daya sebesar 4,29%.

5. Analisis Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66
Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
- Adanya tindaklanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya - Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	- Belum adanya pohon kinerja - Belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda - Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal	- Menyusun pohon kinerja, bimbingan teknis Perencanaan Kinerja - telah menyusun kebijakan reward & punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal

Tabel 3.67
Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
Perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, mempermudah akses pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi	SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik	Bimbingan teknis pelayanan prima bagi petugas layanan Menyusun standarisasi pelayanan publik di semua UPP sesuai dengan

6. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah sebagai berikut:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100,00\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.69
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2024

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	60.16	B
2	2020	62.11	B

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
3	2021	63.84	B
4	2022	64.73	B
5	2023	65.17	B
6	2024	66.36	B

Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menunjukkan nilai 66,36 dengan predikat “B”. Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024:

Tabel 3.70
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,52
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,36

Sumber Kementerian PAN dan RB Tahun 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Gambar 3.27
Dokumentasi Kegiatan pencanangan Zona Integritas

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran masukan dan sarana prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.71

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.72

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2024

No.	TAHUN	NILAI
1	2019	79,95
2	2020	80,41

No.	TAHUN	NILAI
3	2021	82,06
4	2022	83,41
5	2023	84,97
6	2024	86,91

Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.73
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,88	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	94,23	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,60	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	87,30	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	84,98	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,15	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,98	B (Baik)
8	Dinas Sosial	86,76	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	84,96	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	78,14	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,86	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86,70	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	90,90	A (Sangat Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	85,18	B (Baik)
15	RSUD	87,66	B (Baik)
16	Badan Perencanaan	88,24	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	86,85	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,85	B (Baik)
19	Bagian PBJ	83,04	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	86,33	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,94	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	86,73	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	87,58	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,30	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	83,41	B (Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	85,04	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,02	B (Baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,80	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	86,11	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	86,11	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,36	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	86,24	B (Baik)
34	Kecamatan Gemawang	86,70	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	88,02	B (Baik)
36	Kecamatan Candiroto	84,33	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,23	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,89	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,38	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	87,26	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,51	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	90,08	A (Sangat Baik)
43	Puskesmas Pare	91,10	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	85,79	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,89	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	85,16	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	88,16	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	88,05	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	91,89	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	88,69	A (Sangat Baik)
51	Puskesmas Kedu	87,50	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,97	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,80	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	91,37	A (Sangat Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,99	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,43	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	85,73	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	85,59	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,03	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	91,19	A (Sangat Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
61	Puskesmas Banjarsari	86,51	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroto	80,41	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	91,28	A (Sangat Baik)
64	Puskesmas Wonoboyo	95,13	A (Sangat Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,30	B (Baik)
Nilai IKM Kabupaten Temanggung		86,91	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kabupaten Temanggung kami telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meriviu standar pelayanan untuk beberapa Perangkat Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
2. Melaksanakan FKP di hampir semua Unit Pelayanan Publik.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima untuk semua Perangkat Daerah & 4 Puskesmas (Puskesmas Temanggung dan Puskesmas Bulu, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Wonoboyo) yang menjadi lokus Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.
4. Memberikan pendampingan dan fasilitasi khusus untuk Unit Pelayanan yang menjadi lokus Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Hasil penilaian Ombudsman untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan adalah 97,06 Kategori A dengan Opini Kualitas tertinggi, Sedangkan hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB adalah 4,29 Kategori A-.
6. Pembinaan kepada semua Unit Pelayanan Publik.



Gambar 3.28
Pelayanan langsung kepada masyarakat

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.74
Realisasi APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024 (*unaudited*)

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.057.402.240.749	2.101.479.855.788	102,14
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.678.943.856	388.858.102.726	108,41
4101	Pajak Daerah	78.370.855.400	76.926.746.042	98,16
4102	Retribusi Daerah	10.969.140.000	10.925.370.668	99,60
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254	22.645.578.254	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	246.693.370.202	278.360.407.762	112,84
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.723.296.893	1.710.621.753.062	100,82
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.495.359.669.632	1.525.673.694.150	102,03
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.363.627.261	184.948.058.912	91,85
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
5	BELANJA DAERAH	2.137.443.373.410	2.082.224.159.824	97,42
51	BELANJA OPERASI	1.564.830.792.783	1.512.987.691.753	96,69
5101	Belanja Pegawai	851.323.591.147	835.414.435.528	98,13
5102	Belanja Barang dan Jasa	589.422.353.383	555.355.516.548	94,22
5105	Belanja Hibah	113.120.840.253	111.467.431.677	98,54
5106	Belanja Bantuan Sosial	10.964.008.000	10.750.308.000	98,05
52	BELANJA MODAL	173.681.549.502	164.561.497.546	94,75
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.851.110.884	77.286.656.183	94,42
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.525.195.380	37.465.772.157	92,45

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.344.930.542	41.954.115.310	96,79
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.892.317.696	7.796.173.009	98,78
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	67.995.000	58.780.887	86,45
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	397.781.031.125	404.674.970.525	101,73
5401	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770	8.753.922.170	99,73
5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.003.532.355	395.921.048.355	101,78
	Surplus (Defisit)	(80.041.132.661)	19.255.695.964	(24,06)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.041.132.661	145.392.463.476	100,24
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.586.102.661	141.586.102.661	100,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000	3.762.208.484	108,89
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	44.152.331	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
	Pembiayaan Netto	80.041.132.661	80.277.419.264	100,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	99.533.115.228	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat

adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada RPD Tahun 2024-2026, Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan Indeks

Pembangunan Manusia. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Dana Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 pada bidang pertanian yaitu :

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- b. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1. 411.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.398.448.400,- (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99.11%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian terdiri atas kegiatan irigasi perpompaan 8 unit, dan irigasi perpipaan 4 unit. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Pagu Rp 1.360.000.000,- realisasi Rp 1.351.568.400,- atau 99,38% realisasi fisik 100%)
- b. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 14.980.000,- atau 99,86% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.
- c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 36.000.000,- realisasi Rp 31.900.000,- atau 88,61% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini

mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.75
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen	1.411.000.000	1.398.448.400	99,11	100
1.1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian				
	Rincian Kegiatan				
1.1.1	IRIGASI PERPOMPAAN	960.000.000	956.400.400	99,63	100,00
1.	Persiapan	16.000.000	15.690.000	98,06	100,00
	Belanja Bahan	2.450.000	2.450.000	100,00	100,00
	Belanja Honor Output Kegiatan	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	750.000	440.000	58,66	100,00
2.	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaaan	932.000.000	930.950.400	99,88	100,00
	Belanja Jasa Konsultan	22.400.000	21.800.400	97,32	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota	5.700.000	5.250.000	92,10	100,00
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang	902.400.000	902.400.000	100,00	100,00
3.	Monitoring dan pelaporan	12.000.000	9.760.000	81,33	100,00
	Belanja bahan	2.450.000	2.450.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000	4.050.000	65,85	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	1.900.000	1.900.000	100,00	100,00
1.1.2	IRIGASI PERPIPAAN	400.000.000	395.168.000	98,79	100,00
1.	Persiapan	20.000.000	15.768.000	78,84	100,00
	Belanja bahan	850.000	850.000	100,00	100,00
	Belanja Honor Output Kegiatan	2.300.000	2.300.000	100,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultan	14.000.000	9.768.000	69,77	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.850.000	2.850.000	100,00	100,00
2.	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi	376.000.000	376.000.000	100,00	100,00
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang	376.000.000	376.000.000	100,00	100,00
3.	Monitoring dan pelaporan	4.000.000	3.400.000	85,00	100,00
	Belanja Bahan	700.000	700.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000	2.700.000	81,81	100,00
1.1.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	15.000.000	14.980.000	99,86	100,00
	Belanja Bahan	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.480.000	98,66	100,00
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
1.1.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian	36.000.000	31.900.000	88,60	100,00
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22.080.000	18.360.000	83,15	100,00

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bahan	3.875.000	3.875.000	100,00	100,00
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.395.000	1.395.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.900.000	7.520.000	95,18	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	750.000	750.000	100,00	100,00
	Jumlah	1.411.000.000	1.398.448.400	99,11	100,00

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan penghargaan antara lain:

1. Penghargaan Penyelesaian Disparitas ASN dengan Persentase Terbanyak dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.78



2. Juara 3 Kategori Support Pemda dengan Sharing Dana Terbanyak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.



3. Peghargaan Implementasi jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) melalui mekanisme Anggaran Santunan Kematian



4. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat kabupaten sebagai terbaik pertama atas prestasi dalam penyusunan perencanaan berkualitas, pencapaian, serta inovasi pembangunan.



5. IGA Award sebagai kabupaten sangat inovative Tingkat Nasional



6. IGA Award sebagai Kabupaten tercepat menyampaikan inovasi Tingkat nasional



7. Terbaik I PPD Provinsi Jawa Tengah



8. Juara Pertama Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Ket [Foto]:

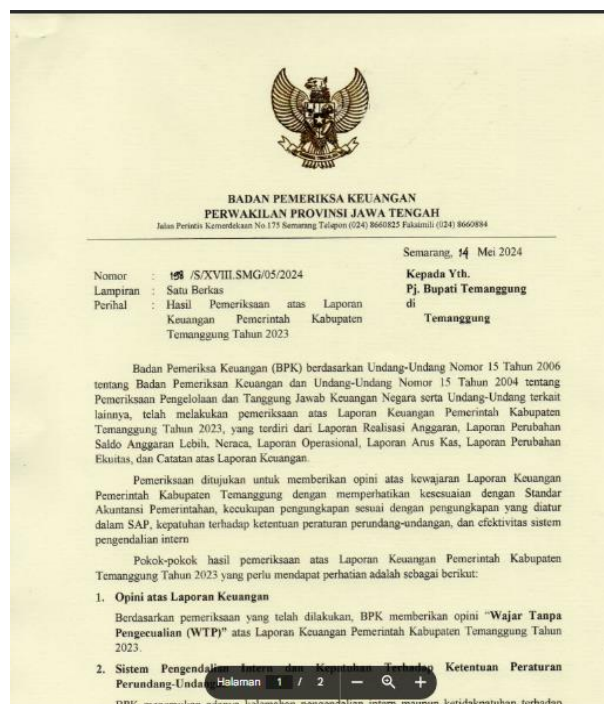
Pesawat Aerotex X1 Temanggung Juarai Krenova Tingkat Jateng 2024

Jumat, 12/07/2024 07:45 WIB Smart Government Umum 392 0

9. Piagam Penghargaan Opini WTP atas LKPD

Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 merupakan opini WTP ke 12 yang diterima pada bulan Mei 2024 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2024 akan diumumkan sekitar bulan April Mei di tahun 2025.

Opini WTP 2023 yang diterima di tahun 2024



10. Piagam penghargaan KPPN Magelang atas Penyelesaian Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2024



11. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “SANGAT BAIK” Tahun 2022,Tahun 2023 dan 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Penyeraham Penghargaan pelayanan Publik



12. Dukcapil Prima Award Kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat dari Kementerian Dalam Negeri.



13. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB.



14. Kualitas Tertinggi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Dengan nilai fantastis 97,06 dari Ombudsman.



15. Terbaik III Lomba Puskesmas Bersih (Puskesmas Bulu) Tingkat Provinsi Jawa Tengah



16. Penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok



17. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2024 dari Komisi Informasi Prov. Jateng



18. Juara Harapan 1 Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah



19. Kontributor Teraktif Ke 2 Portal Berita Provinsi Jawa Tengah



20. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



21. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



22. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



23. Penghargaan Partisipasi Program Kampung Iklim (ProKlim)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 secara keseluruhan dari 3 (tiga) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang diukur dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Untuk indikator tujuan rata-rata tercapai **98,55%** atau kategori **“sangat tinggi”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar **98,01%** atau kategori **“sangat tinggi”**.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 10 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan bahwa 10 Sasaran Strategis tercapai dengan dikategorikan **"sangat tinggi"**.

Pencapaian target kinerja dari 10 Sasaran Strategis 2024-2026 untuk tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar 2.137.443.373.410,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.082.224.159.824,00 atau 97,42%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 55.219.213.586,00 (2,58%).

Dana tugas pembantuan tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.411.000.000,- dengan realisasi Rp 1.398.448.400,- atau 99,11% dan realisasi fisik telah tercapai 100% yang digunakan untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian serta Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 tercapai sebesar 98,28% atau kategori “**sangat tinggi**”.

Hal tersebut artinya sebagian besar capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, pada tahun 2024, progres penyelesaian terhadap Isu Strategis Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi

Isu strategis sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 diselesaikan dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan ini dilaksanakan dengan 5 sasaran dan 8 indikator sasaran. Dapat disimpulkan untuk indikator IPM target 2024 sebesar 71,77 tercapai sebesar 71,86 termasuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami trend kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,57) menjadi kategori tinggi (71,86). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.

Tabel 4.1
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,58	75,64	75,7	75,77	75,94
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,14	12,08	12,55	12,61	12,62

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,24	6,94	7,41	7,50	7,53
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.343	9.142	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2020-2024 naik dari 69,57 pada tahun 2020 menjadi 71,86 pada tahun 2024, termasuk kategori tinggi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan laju 0,89 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,31. Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/ sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Isu strategis pertumbuhan ekonomi diselesaikan melalui tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini dilaksanakan dengan 2 sasaran dan 7 indikator sasaran, dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan, melalui sasaran meningkatnya perkonomian daerah dan meningkatnya

penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2024 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi target 5,27 tercapai 5,04 atau tercapai sebesar 95,64%, Pendapatan Per Kapita target sebesar 32,25 terealisasi sebesar 33,43 atau tercapai 100%, Tingkat Pengangguran Terbuka target sebesar 2,52 realisasi 2,35 atau tercapai 100%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Target	Realisasi
2020	5,30	-2,13
2021	2,50	3,34
2022	3,50	5,20
2023	4,80	5,0
2024	5,27	5,04

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 5,04 lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 5,0. Meskipun di tengah tekanan ekonomi yang masih begitu kuat, Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap mengupayakan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

3. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian isu tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN melalui tiga

sasaran yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukan informasi, meningkatnya pengelolaan SDM aparatur, dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih melayani.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2024 untuk indikator indeks reformasi birokrasi target B>60-70 tercapai 86,01 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dengan target B>60-70 sudah tercapai sebesar 100%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target B/76,61 – 88,30 tercapai 86,91 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir RPD dengan target B/76,61 – 88,30 juga sudah tercapai sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, pada tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

Temanggung, 26 Maret 2025
Bupati Temanggung,

Agus Setyawan, S.E.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

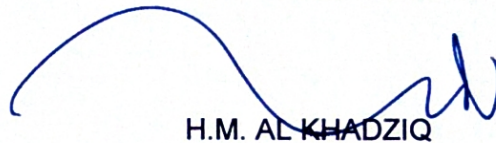
Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	TUJUAN 1		
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,04
	SASARAN STRATEGIS		
	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,55
	2. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18
		Indeks Pembangunan Olahraga	3,61
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21
	3. Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	4,2
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,7
	5. Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,7
	TUJUAN 2		
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4,8
	SASARAN STRATEGIS		
	6. Meningkatnya perekonomian daerah	Pendapatan Per kapita	29,57
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8
		Angka Kemiskinan	9,3
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,52
	7. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95
		Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	63,47
		Indeks Rasa Aman	4,62
	TUJUAN 3		
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	B
	SASARAN STRATEGIS		
	8. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	65,5

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	9. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	0,4
	10. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

Temanggung, 5 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG



H.M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 2. Januari 2024
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,77 (Angka)
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,27 (%)
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B/>60-70 (Predikat/Nilai)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85 (Tahun)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6 (Tahun)
2	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18 (Angka)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,61 (Angka)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21 (Angka)
3	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	4,50 (Angka)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,71 (Tahun)
5	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,75 (Angka)
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	32,25 (Ribu Rp)
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8 (Angka)
		Angka Kemiskinan	8,5 (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,52 (%)
7	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95 (Angka)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,47 (Angka)
		Indeks Rasa Aman	4,62 (Angka)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,5 (Angka)
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Merit System	0,50 (Angka)
10	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B >60-70 (Predikat/Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B>76,61-88,30 (Predikat/Nilai)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 535.201.534.698
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 152.978.179.500
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 162.644.876.153
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 245.902.886.309
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.276.893.000
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 445.344.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.543.701.590
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 10.436.006.800
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.681.058.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 10.469.879.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.531.000.000
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 4.200.000.000
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 3.020.000.000
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 23.896.107.000
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 950.000.000
16	Program Pengembangan Perumahan	Rp 962.076.200
17	Program Kawasan Permukiman	Rp 6.597.124.790
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.439.634.026
19	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.480.713.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
20	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.203.174.000
21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.602.679.000
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.075.879.559
23	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 190.000.000
24	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 20.000.000
25	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 874.667.400
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 23.283.062.415
27	Program Penanganan Bencana	Rp 270.000.000
28	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 200.000.000
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.777.472.749
30	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 800.000.000
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 440.000.000
32	Program Hubungan Industrial	Rp 65.000.000
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.614.040.671
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 35.000.000
35	Program Perlindungan Perempuan	Rp 75.000.000
36	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 35.000.000
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 10.000.000
38	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 95.000.000
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.478.820.754
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.335.709.684
41	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 200.000.000
42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 442.955.150
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 2.050.000.000
44	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 35.738.800
45	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 50.000.000
46	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 9.164.999.700
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.590.020.415
48	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 750.000.000
49	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 270.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.557.028.258
51	Program Penataan Desa	Rp 15.000.000
52	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.848.000.000
53	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 523.500.000
54	Program Pengendalian Penduduk	Rp 423.256.000
55	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.293.884.000
56	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.273.400.000
57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.242.934.008
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 14.815.464.000
59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.859.739.428
60	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 3.243.331.100
61	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.046.932.300
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.426.014.203
63	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 15.000.000
64	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 25.000.000
65	Program Pengembangan UMKM	Rp 50.000.000
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.764.720.143
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 7.000.000
68	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 7.000.000
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 3.246.999.800
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 404.961.000
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 200.000.000
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 2.995.000.000
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 250.000.000
74	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 102.832.800
75	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 100.000.000
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.251.227.229
77	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 10.855.000.000
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.336.241.312
79	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.181.189.000
80	Program Pengelolaan Arsip	Rp 199.300.000
81	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 150.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 154.250.000
83	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 16.992.101.143
84	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 8.282.730.900
85	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 721.500.000
86	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 250.000.000
87	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.161.303.300
88	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 10.000.000
89	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 20.000.000
90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 410.000.000
91	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.846.062.527
92	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 28.473.785.700
93	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.386.327.133
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.000.881.724
95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 21.380.881.151
96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.408.388.943
97	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 789.782.500
98	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 543.500.000
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.402.299.986
100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 404.343.272.125
101	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.100.551.400
102	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 675.509.500
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.525.232.428
104	Program Kepegawaian Daerah	Rp 433.999.500
105	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 609.000.000
106	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 353.999.400
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.443.136.436
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 662.215.000
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 363.000.000
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 54.586.833.602
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 2.039.847.190

NO	PROGRAM	ANGGARAN
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 12.345.412.750
113	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 340.789.650
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 408.904.900
115	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.667.315.885
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 415.000.000
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 30.460.469.000
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 185.000.000
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 317.500.000

Temanggung, 2. Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 2 September 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,77 (Angka)
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,27 (%)
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B/>60-70 (Predikat/Nilai)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85 (Tahun)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,6 (Tahun)
2	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18 (Angka)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,61 (Angka)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21 (Angka)
3	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	4,50 (Angka)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,71 (Tahun)
5	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,75 (Angka)
6	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	32,25 (Ribu Rp)
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8 (Angka)
		Angka Kemiskinan	8,5 (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,52 (%)
7	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95 (Angka)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,47 (Angka)
		Indeks Rasa Aman	4,62 (Angka)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,5 (Angka)
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Indeks Merit System	0,50 (Angka)
10	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Bersih dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B >60-70 (Predikat/Nilai)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B>76,61-88,30 (Predikat/Nilai)

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	510.723.639.116
2	Program Pengelolaan Pendidikan	190.204.001.965
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.495.340.756
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	254.665.515.681
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.327.703.000
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	445.344.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.867.179.400
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.691.207.894
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.767.238.882
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.645.297.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.469.879.000
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.351.000.000
13	Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.820.000.000
15	Program Penyelenggaraan Jalan	33.003.168.000
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	950.000.000
17	Program Pengembangan Perumahan	1.010.076.140
18	Program Kawasan Permukiman	8.032.124.790

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.186.470.749
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.680.713.000
21	Program Penanggulangan Bencana	1.703.174.000
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.612.679.000
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.100.641.003
24	Program Pemberdayaan Sosial	190.000.000
25	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000
26	Program Rehabilitasi Sosial	974.667.400
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.344.461.715
28	Program Penanganan Bencana	1.770.000.000
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	200.000.000
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.413.200
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	800.000.000
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	240.000.000
33	Program Hubungan Industrial	65.000.000
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.489.938.912
35	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000
36	Program Perlindungan Perempuan	75.000.000
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.000.000
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	10.000.000
39	Program Perlindungan Khusus Anak	95.000.000
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.497.861.392
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.751.561.989
44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000
45	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	452.954.550
46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.387.500.000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
47	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.738.800
48	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000
49	Program Pengelolaan Persampahan	9.127.499.700
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.506.996.881
51	Program Pendaftaran Penduduk	750.000.000
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	270.000.000
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.460.744.179
54	Program Penataan Desa	15.000.000
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.848.000.000
56	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	523.500.000
57	Program Pengendalian Penduduk	423.256.000
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.301.754.000
59	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.273.400.000
60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.106.660.740
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.817.280.000
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.879.655.466
63	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.393.331.100
64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.033.508.625
65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.170.302.910
66	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	25.000.000
68	Program Pengembangan UMKM	50.000.000
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.545.941.100
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000
71	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.246.985.800
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.095.000.000
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250.000.000
77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	102.832.500
78	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	112.500.000
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.103.136.130
80	Program Pengembangan Kebudayaan	11.155.000.000
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.929.312.271
82	Program Pembinaan Perpustakaan	1.181.189.000
83	Program Pengelolaan Arsip	199.300.000
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	200.000.000
85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	154.250.000
86	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.045.020.343
87	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.107.730.900
88	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	751.500.000
89	Program Penyuluhan Pertanian	250.000.000
90	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.161.303.300
91	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.000.000
92	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20.000.000
93	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	610.000.000
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.092.881.268
95	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.203.785.700
96	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.314.108.422
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.391.732.066
98	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.104.093.751
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.913.244.801
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.213.782.500
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	543.500.000
102	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.672.100.882

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	400.481.412.125
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	686.018.000
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.448.876.102
107	Program Kepegawaian Daerah	1.266.019.500
108	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	601.700.000
109	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	353.999.400
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.350.066.506
111	Program Penyelenggaraan Pengawasan	539.745.300
112	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	365.840.000
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.236.917.097
114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.039.847.190
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12.552.562.750
116	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	340.789.650
117	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	368.907.000
118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.371.215.726
119	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	565.000.000
120	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.489.283.995
121	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	185.000.000
122	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	569.500.000

Temanggung, 2 September 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO